



**PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN**

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NOMOR : 7 / KSB / BPKAD / VII / 2024

NOMOR : 11/ DPRD / VII / 2024

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD TAHUN ANGGARAN 2025**

BPKAD KAB. MUBA



Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
 Nomor : 7 /KSB/BPKAD/VII/2024
 Nomor : II /DPRD/VII/2024
 Tanggal : 31 Juli 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RINGKASAN STRUKTUR RANCANGAN APBD KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	R-APBD TA. 2025	PEMBAHASAN BANGGAR	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH	3.366.370.761.800,00	3.366.370.761.800,00	-	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	529.884.959.800,00	529.884.959.800,00	-	
4.1.01	Pajak Daerah	216.466.151.000,00	216.466.151.000,00	-	
4.1.02	Retribusi Daerah	5.195.787.000,00	5.195.787.000,00	-	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	278.223.021.800,00	278.223.021.800,00	-	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.836.485.802.000,00	2.836.485.802.000,00	-	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.710.885.802.000,00	2.710.885.802.000,00	-	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	125.600.000.000,00	125.600.000.000,00	-	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	-	
5	BELANJA	3.423.853.775.772,00	3.408.867.666.146,00	(14.986.109.626,00)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(57.483.013.972,00)	(42.496.904.346,00)	14.986.109.626,00	
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	69.983.013.972,00	69.983.013.972,00	-	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.983.013.972,00	69.983.013.972,00	-	

KODE	URAIAN	R-APBD TA. 2025	PEMBAHASAN BANGGAR	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.500.000.000,00	27.486.109.626,00	14.986.109.626,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.500.000.000,00	27.486.109.626,00	14.986.109.626,00	
	- Perumdam PDAM Tirta Musi	7.500.000.000,00	24.486.109.626,00	16.986.109.626,00	
	- Bank Sumsei Babel	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTO	57.483.013.972,00	42.496.904.346,00	(14.986.109.626,00)	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkecuaan	-	-	-	
	TOTAL RANCANGAN APBD	3.436.353.775.772,00	3.436.353.775.772,00	-	

SEKAYU, 31 JULI 2024

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

Selaku

PIHAK PERTAMA


H. SANDI FAHLEPI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Selaku

PIHAK KEDUA


H. SUGONDO
KETUA


JONKENEDI
WAKIL KETUA


IRWIN ZULYANI, S.H
WAKIL KETUA


ENDI SUSANTO, S.E
WAKIL KETUA



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

DAFTAR ISI

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I	PENDAHULUAN.....	I-1
	1.1 LATAR BELAKANG	I-1
	1.2 TUJUAN	I-2
	1.3 DASAR HUKUM	I-2
	1.4 SISTEMATIKA	I-9
BAB II	RENCANA PENERIMAAN DAERAH	II-1
BAB III	PRIORITAS BELANJA DAERAH	III-1
	3.1 PRIORITAS PEMBANGUNAN	III-1
	3.2 SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN PRIORITAS NASIONAL	III-5
	3.3 SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN PRIORITAS PROVINSI SUMATERA SELATAN	III-7
	3.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	III-8
BAB IV	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	IV-1
BAB V	RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	V-1
BAB VI	PENUTUP	VI-1



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2025	II - 2
Tabel 2.2 Rencana Rincian Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2025	II - 3
Tabel 3.1 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan RKPD 2025 dengan Prioritas Pembangunan Nasional RKP 2025 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 2025	III - 5
Tabel 3.2 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	III - 6
Tabel 3.3 Sinkronisasi Alokasi Pagu Anggaran Prioritas Daerah RKPD 2025 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 2025	III - 7
Tabel 3.4 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah	III - 8
Tabel 4.1 Plafon Anggaran per Masing-masing Urusan dan Perangkat Daerah RAPBD Tahun 2025	IV - 1
Tabel 5.1 Plafon Anggaran Sementara untuk Pembiayaan RAPBD TA. 2025	V - 2



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun berdasarkan kebijakan sebagaimana yang diarahkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA). Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian tak terpisahkan dari Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 yang dibahas bersamaan dan disepakati oleh eksekutif dan legislatif. Di dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 ini memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang akan diberikan untuk setiap program dan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta integrasi program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2025 dilakukan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang ingin dilakukan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing Perangkat Daerah (PD).

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Secara umum tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 adalah untuk menyusun pedoman dalam rangka penganggaran daerah yang



merupakan skala prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD. PPAS selanjutnya dibahas dengan DPRD untuk dapat disepakati menjadi Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, substansi PPAS mencakup rencana pendapatan dan pembiayaan daerah, prioritas belanja daerah, dan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan dan rencana pembiayaan daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Landasan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan



Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);



7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 4829);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
16. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);



24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
26. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Sekayu;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan



Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9), Sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11);
32. Peraturan Bupati Nomor 270 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 270);
33. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);
34. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 27).



1.4. Sistematika Dokumen PPAS

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang Latar Belakang Penyusunan PPAS, Tujuan Penyusunan dan Dasar Hukum dan Sistematika penyusunan PPAS.

BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Bab ini memuat uraian tentang sumber-sumber Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah .

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Bab ini memuat uraian tentang kebijakan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Bab ini memuat tentang Plafon Anggaran Sementara masing-masing urusan pemerintahan, plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan, plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

BAB VI PENUTUP



BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Rencana target penerimaan daerah pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 3.436.353.775.772,-. yang terdiri dari :

A. Pendapatan Daerah sebesar Rp. 3.366.370.761.800,- terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 529.884.959.800,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pajak Daerah sebesar Rp. 216.466.151.000,00

b. Retribusi Daerah sebesar Rp. 5.195.787.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp. 30.000.000.000,00

d. Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar Rp. 278.223.021.800,00

2) Pendapatan Transfer sebesar Rp. 2.836.485.802.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 2.710.885.802.000,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 125.600.000.000,00

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 0,00

B. Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 69.983.013.972,00 secara rinci proyeksi penerimaan pembiayaan daerah untuk tahun anggaran 2025 yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp. 69.983.013.972,-



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

Tabel 2.1
Rencana Penerimaan Daerah
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN DAERAH	3.366.370.761.800,00	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	529.884.959.800,00	
4.1.01.	Pajak Daerah	216.466.151.000,00	
4.1.02.	Retribusi Daerah	5.195.787.000,00	
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	
4.1.04.	Lain-Lain PAD Yang Sah	278.223.021.800,00	
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.836.485.802.000,00	
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.710.885.802.000,00	
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	125.600.000.000,00	
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	
4.3.01.	Lain Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan	0,00	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		3.366.370.761.800,00	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	69.983.013.972,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.983.013.972,00	
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		69.983.013.972,00	
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		3.436.353.775.772,00	

Sumber : RKPD Kab.Muba Tahun 2025



PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 2.2
Rencana Rincian Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2025

URAIAN	PROYEKSI PENDAPATAN TA. 2025 (Rp.)
1	2
PENDAPATAN	3.366.370.761.800,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	529.884.959.800,00
PAJAK DAERAH	216.466.151.000,00
Pajak Hotel	1.585.642.000,00
Pajak Hotel	900.000.000,00
Pajak Losmen	330.000.000,00
Pajak Wisma Pariwisata	355.642.000,00
Pajak Restoran	18.959.803.000,00
Pajak Restoran & Sejenisnya	3.029.803.000,00
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0,00
Pajak Kantin dan Sejenisnya	0,00
Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00
Pajak Jasa Boga / Katering dan Sejenisnya	15.930.000.000,00
Pajak Hiburan	137.511.000,00
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	90.311.000,00
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan	18.000.000,00
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap /Spa dan Pusat Kebugaran.	29.200.000,00
Pajak Reklame	2.729.859.000,00
Reklame Papan/Bilboard/Videotron /Megatron	2.314.000.000,00
Reklame Kain	345.000.000,00
Reklame Melekat / Stiker	859.000,00
Reklame Berjalan	70.000.000,00
Pajak Tenaga Listrik	44.521.171.000,00
Pajak Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	38.500.000.000,00
Pajak Konsumsi Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri	6.021.171.000,00
Pajak Parkir	706.033.000,00
Parkir	706.033.000,00
Pajak Air Tanah	420.000.000,00
Air Tanah	420.000.000,00
Pajak Sarang Burung Walet	332.697.000,00



PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN	PROYEKSI PENDAPATAN TA. 2025 (Rp.)
1	2
Sarang Burung Walet	332.697.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.029.103.000,00
Pajak Pasir dan Kerikil	1.100.103.000,00
Pajak Tanah Liat	929.000.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	29.904.394.000,00
Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan	29.904.394.000,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	25.139.938.000,00
Pemindahan hak	8.895.077.000,00
Pemberian hak baru	16.244.861.000,00
Opsen PKB	40.000.000.000,00
Opsen PKB	40.000.000.000,00
Opsen BBNKB	50.000.000.000,00
Opsen BBNKB	50.000.000.000,00
RETRIBUSI DAERAH	5.195.787.000,00
Retribusi Jasa Umum	447.000.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	220.000.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	0,00
Retribusi Pelataran	200.000.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0
Retribusi Penyedotan Kakus	27.000.000,00
Retribusi Pelayanan Tera Ulang	0
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0
Retribusi Jasa Usaha	2.248.787.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	5.000.000,00
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	310.000.000,00
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	210.000.000,00
-Dinas Perhubungan	60.000.000,00
-Dinas Perdagangan dan Perindustrian	150.000.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	40.000.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	142.427.000,00



PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN	PROYEKSI PENDAPATAN TA. 2025 (Rp.)
1	2
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.541.360.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	2.500.000.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.500.000.000,00
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	30.000.000.000,00
Bagian Laba yang dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	30.000.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	278.223.021.800,00
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	35.000.000,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0
Hasil Penjualan Alat Angkutan	0
Hasil Penjualan Aset tetap lainnya	35.000.000,00
- Penjualan Biota Perairan	35.000.000,00
- Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan	0
Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	0,00
Hasil Sewa BMD (BPKAD)	0,00
Jasa Giro	5.500.000.000,00
Jasa Giro Pada Kas Daerah	5.000.000.000,00
Jasa Giro Pada Kas di Bendahara	500.000.000,00
Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00
Pendapatan Bunga Atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00
Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	15.000.000.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	15.000.000.000,00
PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	5.550.000.000,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	5.550.000.000,00
- Taspen	50.000.000,00
- Lain-Lain (BP2RD)	500.000.000,00
- PT PETRO MUBA	5.000.000.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	317.200.000,00
Pendapatan Denda Pajak Hotel	5.000.000,00
Pendapatan Denda Pajak Losmen	3.000.000,00
Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata	1.000.000,00



PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN	PROYEKSI PENDAPATAN TA. 2025 (Rp.)
1	2
Pendapatan Denda Pajak Restoran	25.000.000,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan Dan Sejenisnya	15.000.000,00
Pendapatan Denda Pajak Kafetaria Dan Sejenisnya	3.000.000,00
Pendapatan Denda Pajak Kantin Dan Sejenisnya	200.000,00
Pendapatan Denda Pajak Warung Dan Sejenisnya	15.000.000,00
Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering Dan Sejenisnya	100.000.000,00
Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa	100.000,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	3.500.000,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	100.000,00
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	5.000.000,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	500.000,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	500.000,00
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	300.000,00
Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil	10.000.000,00
Pendapatan Denda PBBP2	100.000.000,00
Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	29.500.000,00
Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	500.000,00
Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	100.000.000,00
Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang dan Jasa	100.000.000,00
Pendapatan dari Pengembalian	234.332.000,00
Pendapatan Hasil Badan Layanan Umum Daerah	245.486.489.800,00
BLUD RSUD Sekayu	140.000.000.000,00
BLUD RSUD Sungai Lilin	28.750.000.000,00
BLUD RSUD Bayung Lencir	25.000.000.000,00
BLUD Puskesmas	51.736.489.800,00
BLUD UPT-BLK	0,00
PENDAPATAN TRANSFER (Pusat + Antar Daerah)	2.836.485.802.000,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.710.885.802.000,00
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	1.946.209.896.000,00
DBH PBB	913.927.896.000,00
Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	20.672.843.000,00
DBH PPh Psl.25 dan Psl.29 /WPOPDN	287.377.000,00



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

URAIAN	PROYEKSI PENDAPATAN TA. 2025 (Rp.)
1	2
DBH Cukai Hasil Tembakau	10.000.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	226.307.447.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	569.216.170.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	199.828.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral Batubara-Landrent	18.877.397.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral Batubara-Royalty	191.474.641.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.092.455.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.143.842.000,00
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)	540.884.119.000,00
Dana Desa	223.791.787.000,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	125.600.000.000,00
Pendapatan Bagi Hasil	125.600.000.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	125.600.000.000,00
Pendapatan bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	90.000.000.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	600.000.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	35.000.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	0
Lain-Lain Pendapatan	-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	69.983.013.972,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.983.013.972,00
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	3.436.353.775.772,00

Sumber : BPKAD dan BP2RD Kab.Muba Tahun 2024



BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1. Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

Sebagaimana prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 dan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin kedepan baik jangka menengah maupun jangka pendek, maka ditetapkan program prioritas pembangunan serta program penunjangnya. Untuk menentukan program prioritas pembangunan ini tetap memperhatikan Program Prioritas Nasional maupun Provinsi Sumatera Selatan dengan tetap mempedomani Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026.

Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2025 akan difokuskan pada optimisme bahwa momentum pemulihan ekonomi akan tetap berjalan. Stabilitas harga juga akan terus dijaga, dengan pengendalian inflasi untuk mempertahankan daya beli masyarakat, peningkatan kualitas manusia indonesia, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, pembangunan yang merata dan berkeadilan, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, Pengelolaan pemerintahan yang bersih, Efektif dan terpercaya, Sinergitas pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.



PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Memperhatikan Rencana Pembangunan Nasional tersebut maka pemerintah untuk tahun 2025 menentukan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**

Program Prioritas RKP Nasional tersebut dijabarkan dalam RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera menetapkan tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 Adapun tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah **“Penguatan Daya Saing Daerah menuju Sumatera Selatan yang Unggul dan Terdepan”** yang terdiri dari 4 (empat) Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat,
2. Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan,
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana,
4. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum.

Dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025 Tema dan Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 yang mengusung Tema **“Meningkatkan Daya Saing Daerah didukung SDM yang Berkualitas dan Pelayanan Publik yang Bersih”** Untuk mendukung tema pembangunan tahun 2025 tersebut, maka ditetapkan 6 (enam) Prioritas Daerah sebagai berikut:

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

1. Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi;
2. Meningkatkan Pendapatan dan Mengurangi Beban Masyarakat untuk Menurunkan Kemiskinan;
3. Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia; dan
6. Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik.

Sinergisitas pembangunan dan arah kebijakan dari pusat sampai daerah merupakan suatu keharusan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dari pusat sampai ke daerah. Perencanaan pembangunan Musi Banyuasin Tahun 2025 dilaksanakan secara sinergis, berkesinambungan dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan :

1. memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2025 dan RPJMN 2025-2029 serta menyikapi dinamika kebijakan pembangunan nasional;
2. mempedomani arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. memperhatikan capaian kinerja tahun 2023 dan rencana target capaian tahun 2024;
4. memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal;



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

5. mengutamakan upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

Kabupaten Musi Banyuasin melakukan sinkronisasi dengan menjaga sinergitas dan memperhatikan serta mendukung tercapainya target dan sasaran dari prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Secara rinci, sinergisitas kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat dapat dilihat dalam sinkronisasi pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan RKPD 2025 dengan
Prioritas Pembangunan Nasional RKP 2025 dan
Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (ASTA CITA)	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD KAB. MUBA	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMSEL
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur (PN 8)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Rp. 62.771.510.383,- Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi (PN 3)	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Rp. 581.962.938.388,- Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),		Rp. 1.380.649.613.791,-



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (ASTA CITA)	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD KAB. MUBA		PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMSEL
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pemuda, pemuda dan penyandang disabilitas (PN 4)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (PN 1)			
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (PN 5)	Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Rp. 117.897.537.334,-	
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru (PN 2)			
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (PN 6)	Meningkatkan Pendapatan dan Mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Kemiskinan	Rp. 107.259.645.546,-	
Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba (PN 7)	Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.173.312.530.330,-	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum

Sumber : RKPD Kab Musi Banyuasin, 2025

3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Prioritas Nasional

Kabupaten Musi Banyuasin melakukan sinkronisasi dengan menjaga sinergisitas dan memperhatikan serta mendukung tercapainya target dan sasaran dari prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Hasil sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah



***PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025***

Kabupaten/Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 dirinci pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota
Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

**SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)				
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.049.958.635,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			Tersedianya dokumen laporan analisa stabilitas politik		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.321.187.372,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			Persentase Organisasi Masyarakat yang dibina		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	150.062.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
			Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	399.937.890,00
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	700.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.885.494.431,00
			Persentase Layanan Adminitrasi dan Perkantoran		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	163.382.500,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Persentase capaian terlaksananya Informasi Administrasi Kependudukan yang mudah diakses oleh masyarakat		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.815.154.151,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
			Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	108.176.708,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	135.000.000,00
			Jumlah Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	135.000.000,00
			Persentase Layanan Umum Perangkat Daerah		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.021.826.000,00
			Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.985.404.269,00
			Persentase PengelolaanKepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	134.666.000,00
			Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	635.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi)		
				Kecamatan Plakat Tinggi	17.901.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Plakat Tinggi	0,00
			Persentasi Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Plakat Tinggi		
				Kecamatan Plakat Tinggi	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi)		
				Kecamatan Plakat Tinggi	30.000.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Plakat Tinggi		
				Kecamatan Plakat Tinggi	60.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat		
				Kecamatan Plakat Tinggi	601.123.960,00
			Persentase pemenuhan Layanan Administrasi		
				Kecamatan Plakat Tinggi	301.822.158,00
			Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
				Kecamatan Plakat Tinggi	49.850.780,00
			Persentase Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi)		
				Kecamatan Plakat Tinggi	1.919.204.525,00
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru				
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Persentase Jaringan Irigasi, Sungai dan Penampung Air lainnya dalam Kondisi Baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	750.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Produksi Perikanan Tangkap		
				Dinas Perikanan	2.837.260.350,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Produksi Perikanan Budidaya		
				Dinas Perikanan	2.278.464.756,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Tingkat Partisipasi Pokmaswas		
				Dinas Perikanan	1.248.411.957,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Konsumsi Ikan		
				Dinas Perikanan	1.413.289.950,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase ketersediaan prasarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan)		
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	2.698.454.045,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Persentase serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang di tangani		
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	355.110.000,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani		
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.999.994.569,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan		
				Dinas Perkebunan	3.601.036.025,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan		
				Dinas Perkebunan	2.611.455.300,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan		
				Dinas Perkebunan	200.049.000,00
			Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan		
				Dinas Perkebunan	200.049.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Bencana Perkebunan		
				Dinas Perkebunan	14.835.733.609,00
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
			Persentase Pelaku Usaha Perkebunan Mendapatkan Kejelasan Status Usahnya		
				Dinas Perkebunan	385.839.000,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Persentase Penggunaan Teknologi yang diterapkan oleh petani		
				Dinas Perkebunan	3.570.703.696,00
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi				
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.897.010.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	310.830.982.731,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Persentase Ketaatan dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.890.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Persentase lampu jalan dalam kondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.520.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Air Bersih (Peripaan dan Non Perpipaan)		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.795.004.600,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi yang layak (WC Individual, Komunal)		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9.637.066.912,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
			Persentase Drainase dalam Kondisi Baik		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	18.338.765.186,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Persentase penataan bangunan rumah dan gedung negara kabupaten yang ditangani		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	88.251.252.238,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertangani		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.987.632.400,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Persentase Rumah Korban bencana / Relokasi Yang di Bangun / Di rehab		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.835.133.450,00
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
			Persentase Rumah di Luar Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19.710.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Persentase PSU Yang dibangun / direhab		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	50.683.086.756,00
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
			Persentase Tanah yang dibebaskan/ diganti rugi oleh PEMDA		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	20.000.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	170.000.000,00
			Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	890.000.000,00
			Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.527.630.015,00
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	92.295.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Persentase sarana prasarana jalan dalam kondisi baik		
				Dinas Perhubungan	2.871.465.269,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
			Persentase Sarana Prasarana pelayaran dalam kondisi baik		
				Dinas Perhubungan	2.700.177.050,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN			
			Persentase Sarana Prasarana transportasi udara dalam kondisi baik		
				Dinas Perhubungan	88.860.000,00
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas				
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.268.358.100,00
			Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.737.421.900,00
			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	54.742.093.500,00
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	34.008.115.800,00
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	55.211.157.300,00
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	469.063.800,00
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.926.726.231,00
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.002.335.800,00
			Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29.739.757.700,00
			Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29.739.757.700,00
			Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	59.479.515.400,00
			Persentase sekolah yang sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM)		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29.739.757.700,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Pembinaan Sanggar/Komunitas Seni Budaya		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	326.408.000,00
			Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	326.408.000,00
			Penyelenggaraan festival seni dan budaya		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	326.408.000,00
			Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	326.408.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
			Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	275.000.000,00
			Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	275.000.000,00
			Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	275.000.000,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	299.995.000,00
			Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	299.995.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
			Jumlah kegiatan yang di laksanakan dan jumlah koleksi		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	345.716.000,00
			Jumlah Koleksi		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	345.716.000,00
			Jumlah Kunjungan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	345.716.000,00
			Penyelenggaraan Kegiatan yang di laksanakan di Museum		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	345.716.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Persentase pengelolaan bantuan keuangan sektor pendidikan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.105.969.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	550.078.483.467,00
			Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	550.078.483.467,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Angka kematian bayi		
				Dinas Kesehatan	64.430.261.870,00
			Angka kematian ibu		
				Dinas Kesehatan	64.430.261.870,00
			Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jaringan		
				Dinas Kesehatan	64.430.261.870,00
			Jumlah FKRTL Akreditasi Paripurna		
				Dinas Kesehatan	470.009.000,00
			Jumlah FKTP Akreditasi Minimal Utama		
				Dinas Kesehatan	64.430.261.870,00
			Jumlah Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
				Dinas Kesehatan	63.960.252.870,00
			Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas		
				Dinas Kesehatan	64.430.261.870,00
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular		
				Dinas Kesehatan	64.430.261.870,00
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular		
				Dinas Kesehatan	64.430.261.870,00
			Jumlah Pelayanan Standard Minimal Kesehatan		
				Dinas Kesehatan	64.430.261.870,00
			Persentase Alat Kesehatan Memenuhi Syarat		
				Dinas Kesehatan	63.960.252.870,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Alat Kesehatan yang di lakukan pemeliharaan atau kalibrasi		
				Dinas Kesehatan	48.474.443.620,00
			Persentase Jaminan Kesehatan Masyarakat		
				Dinas Kesehatan	470.009.000,00
			Persentase ketersediaan BMHP		
				Dinas Kesehatan	64.430.261.870,00
			Persentase ketersediaan obat essensial		
				Dinas Kesehatan	64.430.261.870,00
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau berpotensi bencana		
				Dinas Kesehatan	470.009.000,00
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana (FKTP dan FKTR)		
				Dinas Kesehatan	15.485.809.250,00
			Prevalensi stunting pada balita		
				Dinas Kesehatan	64.430.261.870,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase Puskesmas dengan jenis Nakes sesuai Standar		
				Dinas Kesehatan	917.594.700,00
			Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya		
				Dinas Kesehatan	917.594.700,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Persentase sertifikasi tempat pengelolaan makanan dan minuman		
				Dinas Kesehatan	33.200.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kesehatan	177.926.980,00
			Persentase desa yang melaksanakan PHBS		
				Dinas Kesehatan	86.014.980,00
			Persentase PHBS tempat kerja		
				Dinas Kesehatan	86.014.980,00
			Persentase Rumah Sehat		
				Dinas Kesehatan	86.014.980,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Dinas Kesehatan	267.511.194.682,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL		
				Dinas Kesehatan	592.478.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL		
				Dinas Kesehatan	266.918.716.682,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Dinas Kesehatan	267.027.872.682,00
			Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu		
				Dinas Kesehatan	383.322.000,00
			Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dilaksanakan dengan tepat		
				Dinas Kesehatan	239.977.711.073,00
			Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
				Dinas Kesehatan	100.000.000,00
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Dinas Kesehatan	27.050.161.609,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			[deleted]		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.050.000.000,00
			Persentase Tenaga Jasa Konstruksi yang terlatih dan bersertifikat		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.050.000.000,00
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
			Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	418.587.050,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	4.524.818.600,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase Pekerja yang ditempatkan		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	978.035.525,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Tahunan		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	743.103.000,00
			Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	743.103.000,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	934.046.550,00
			Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Menerapkan PUG melalui PPRG		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	934.046.550,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	209.710.000,00
			Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	272.961.246,00
			Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	63.251.246,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Jumlah Penghargaan Nasional Kabupaten Layak Anak (KLA)		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	492.805.500,00
			penguatan dan pengembangan lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	492.805.500,00
			Persentase Kecamatan Layak Anak		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	492.805.500,00
			Persentase Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah non pemerintah dan Dunia Usaha		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	248.500.000,00
			Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	244.305.500,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	846.406.500,00
			Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap anak dan dampingan korban bagi anak memerlukan perlindungan khusus		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	846.406.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.350.554.768,00
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	532.004.564,00
			Persentase pemenuhan Layanan Administrasi		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24.968.340,00
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	464.275.500,00
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	676.837.364,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Tingkat Konsumsi Energi PerKapita/Hari		
				Dinas Ketahanan Pangan	3.741.363.738,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Persentase Desa Rawan Pangan (Prioritas 1,2,3)		
				Dinas Ketahanan Pangan	81.902.388,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Persentase Pangan Segar Aman Dikonsumsi		
				Dinas Ketahanan Pangan	297.100.919,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			Jumlah peta persebaran penggunaan alat kontrasepsi		
				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	66.469.867,00
			Persentase Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)		
				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	66.469.867,00
			Persentase stakeholder yang memahami kajian dampak kependudukan.		
				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	66.469.867,00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.598.951.001,00
			Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi		
				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.598.951.001,00
			Persentase Kebutuhan KB Yang Tidak Terpenuhi		
				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.598.951.001,00
			Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE)		
				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.598.951.001,00
			Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.598.951.001,00
			Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB		
				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.598.951.001,00
			Persentase Penggerakan dan Wawasan Masyarakat Tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana		
				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.598.951.001,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			Cakupan Peran Serta Organisasi dan Masyarakat Yang di Bina		
				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	491.655.320,00
			Persentase Jumlah Kelompok PIK-R, BKR, BKB, BKL dan UPPKS Yang Dibina		
				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	983.310.640,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Persentase pemuda yang bebas narkoba		
				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	614.690.000,00
			Persentase pemuda yang berwirausaha terhadap pemuda yang dibina		
				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	1.678.028.500,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga		
				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	80.807.820.111,00
			Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk		
				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	51.812.035.449,00
			Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk.		
				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	27.378.966.823,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
			Persentase Organisasi Kepramukaan yang terakreditasi		
				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	3.435.154.990,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Jumlah objek wisata		
				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	1.319.020.000,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Jumlah kunjungan wisatawan		
				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	1.729.791.600,00
			Jumlah pelaku usaha pariwisata		
				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	1.729.791.600,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	34.219.080,00
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat		
				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	10.928.671.751,00
			Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		
				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	134.505.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Meningkatnya budaya gemar membaca Tingkat Daerah		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	781.594.920,00
			Meningkatnya budaya gemar membaca Tingkat Daerah [deleted]		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	1.732.071.358,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Terbinanya Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.513.666.278,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	756.207.578,00
			Terkelolahnya Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	756.207.578,00
			Terkelolahnya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	756.207.578,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	7.886.938.593,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Angka kematian bayi		
				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	2.500.000.000,00
			Angka kematian ibu		
				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	2.500.000.000,00
			Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jaringan		
				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	2.500.000.000,00
			Jumlah FKRTL Akreditasi Paripurna		
				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	2.500.000.000,00
			Jumlah FKTP Akreditasi Minimal Utama		
				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	2.500.000.000,00
			Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	2.500.000.000,00
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular		
				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	2.500.000.000,00
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular		
				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	2.500.000.000,00
			Jumlah Pelayanan Standard Minimal Kesehatan		
				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	2.500.000.000,00
			Persentase Alat Kesehatan Memenuhi Syarat		
				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	2.500.000.000,00
			Persentase Alat Kesehatan yang di lakukan pemeliharaan atau kalibrasi		
				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	2.500.000.000,00
			Persentase ketersediaan BMHP		
				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	2.500.000.000,00
			Persentase ketersediaan obat essensial		
				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	2.500.000.000,00
			Prevalensi stunting pada balita		
				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	2.500.000.000,00
			Angka kematian bayi		
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	2.500.000.000,00
			Angka kematian ibu		
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	2.500.000.000,00
			Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jaringan		
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	2.500.000.000,00
			Jumlah FKRTL Akreditasi Paripurna		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	2.500.000.000,00
			Jumlah FKTP Akreditasi Minimal Utama		
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	2.500.000.000,00
			Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas		
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	2.500.000.000,00
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular		
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	2.500.000.000,00
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular		
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	2.500.000.000,00
			Jumlah Pelayanan Standard Minimal Kesehatan		
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	2.500.000.000,00
			Persentase Alat Kesehatan Memenuhi Syarat		
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	2.500.000.000,00
			Persentase Alat Kesehatan yang di lakukan pemeliharaan atau kalibrasi		
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	2.500.000.000,00
			Persentase ketersediaan BMHP		
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	2.500.000.000,00
			Persentase ketersediaan obat esensial		
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	2.500.000.000,00
			Prevalensi stunting pada balita		
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	2.500.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL		
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	25.000.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	25.000.000.000,00
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	25.000.000.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL		
				Puskesmas Babat Toman	2.662.818.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Babat Toman	2.662.818.000,00
			Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu		
				Puskesmas Babat Toman	2.662.818.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL		
				Puskesmas Ulak Paceh	2.661.842.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Ulak Paceh	2.661.842.000,00
			Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu		
				Puskesmas Ulak Paceh	2.661.842.000,00
				Puskesmas Cinta Karya	1.200.914.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL		
				Puskesmas Cinta Karya	1.200.914.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Cinta Karya	1.200.914.000,00
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Puskesmas Cinta Karya	1.200.914.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Puskesmas Suka Damai	1.078.177.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL		
				Puskesmas Suka Damai	1.078.177.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Suka Damai	1.078.177.000,00
			Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
				Puskesmas Suka Damai	1.078.177.000,00
			undefined		
				Puskesmas Tebing Bulang	2.422.058.000,00
				Puskesmas Jirak	1.404.263.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL		
				Puskesmas Jirak	1.404.263.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Jirak	1.404.263.000,00
			Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Daerah (BMH) tepat waktu		
				Puskesmas Jirak	1.404.263.000,00
			undefined		
				Puskesmas Jirak	1.404.263.000,00
				Puskesmas Balai Agung	3.734.530.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL		
				Puskesmas Balai Agung	3.734.530.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Balai Agung	3.734.530.000,00
			Peningkatan Pelayanan BLUD		
				Puskesmas Balai Agung	3.734.530.000,00
			Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Daerah (BMH) tepat waktu		
				Puskesmas Balai Agung	3.734.530.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL		
				Puskesmas Lais	2.783.134.500,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Lais	2.783.134.500,00
			Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Daerah (BMH) tepat waktu		
				Puskesmas Lais	2.783.134.500,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL		
				Puskesmas Gardu Harapan	932.395.500,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Gardu Harapan	932.395.500,00
			Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor		
				Puskesmas Gardu Harapan	932.395.500,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL		
				Puskesmas Tanjung Kerang	1.709.166.800,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Tanjung Kerang	1.709.166.800,00
			Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Daerah (BMH) tepat waktu		
				Puskesmas Tanjung Kerang	1.709.166.800,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL		
				Puskesmas Sungai Lilin	2.947.935.700,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Sungai Lilin	2.947.935.700,00
			Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dilaksanakan dengan tepat		
				Puskesmas Sungai Lilin	2.947.935.700,00
				Puskesmas Karya Maju	1.821.514.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL		
				Puskesmas Karya Maju	1.821.514.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL		
				Puskesmas Karya Maju	1.821.514.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Karya Maju	1.821.514.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Karya Maju	1.821.514.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Karya Maju	1.821.514.000,00
			Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Daerah (BMH) tepat waktu		
				Puskesmas Karya Maju	1.821.514.000,00
			Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dilaksanakan dengan tepat		
				Puskesmas Karya Maju	1.821.514.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL		
				Puskesmas Suka Jaya	1.473.013.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Suka Jaya	1.473.013.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
				Puskesmas Suka Jaya	1.473.013.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Berojaya Timur	1.013.775.000,00
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Puskesmas Berojaya Timur	1.013.775.000,00
				Puskesmas Bayung Lencir	4.689.370.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL		
				Puskesmas Bayung Lencir	4.689.370.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Bayung Lencir	4.689.370.000,00
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Puskesmas Bayung Lencir	4.689.370.000,00
				Puskesmas Air Balui	605.263.500,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL		
				Puskesmas Air Balui	605.263.500,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Air Balui	605.263.500,00
			Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu		
				Puskesmas Air Balui	605.263.500,00
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri				
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Jumlah koperasi aktif		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	453.703.800,00
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
			Jumlah Koperasi sehat		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	300.000.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			Jumlah koperasi yang menjalin kerjasama dengan badan usaha lainnya		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	350.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
			Jumlah koperasi yang mampu berdaya saing		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	450.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Jumlah UMK yang berdaya saing		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	892.199.600,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Jumlah Usaha Mikro menjadi usaha kecil		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.368.179.850,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Nilai Kinerja PTSP dan Percepatan Pelayanan Berusaha Pemerintah Daerah		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	239.488.000,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
			Minat Investasi		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	624.739.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Nilai Realisasi investasi PMA		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	420.000.000,00
			Nilai Realisasi investasi PMDN		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	420.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	274.469.510,00
			Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.236.669.192,00
			Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.636.136.197,00
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.328.571.813,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Konsumsi Ikan		
				Dinas Perikanan	316.710.200,00
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
			Persentase Rekomendasi Perizinan Pelaku usaha yang terbit		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	622.268.378,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi Baik		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	4.124.214.850,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Persentase ketersediaan kebutuhan barang pokok dan penting terhadap kebutuhan		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.451.212.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			Persentase peningkatan volume penjualan produk		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	4.833.217.000,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Persentase UTTP Bertanda Tera Sah		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	372.898.040,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			Jumlah Kemitraan Usaha		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	131.511.050,00
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			persentase peningkatan tenaga kerja industri kecil menengah		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.003.180.057,00
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
			Persentase izin Usaha Industri yang Terkendali		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	59.749.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
			Jumlah Usaha Industri yang terdaftar di SIINas		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	235.629.000,00
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase PMKS yang mendapat Layanan		
				Dinas Sosial	13.443.391.370,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase Masyarakat Kurang Mampu (DTKS) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga		
				Dinas Sosial	47.387.063.521,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten		
				Dinas Sosial	1.177.715.000,00
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan				
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase keselarasan program RKPD dalam RPJMD		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.029.387.642,00
			Presentase keselarasan program kabupaten dengan program nasional		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	612.042.750,00
			Rasio ketersediaan data untuk untuk perencanaan pembangunan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	612.042.750,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase program/kegiatan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.498.428.750,00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase Hasil Inovasi yang diimplementasikan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	542.281.197,00
			Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti [deleted]		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	273.378.346,00
			Presentasi hasil inovasi yang diimplementasikan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	159.929.981,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Dilaksanakan Sangat Tepat		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.823.799.983,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	303.900.000,00
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	70.005.132,00
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.210.230.482,00
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	62.478.544.840,00
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.905.894.600,00
			Persentase pemenuhan Layanan Administrasi		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	441.382.700,00
			Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	59.131.267.540,00
				Dinas Kesehatan	689.990.100,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL		
				Dinas Kesehatan	689.990.100,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Dinas Kesehatan	689.990.100,00
			Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
				Dinas Kesehatan	689.990.100,00
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.934.106.269,00
			Persentase Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.128.326.948,00
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentrman, dan Keindahan) di Kabupaten		
				Satuan Polisi Pamong Praja	2.484.450.710,00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota		
				Satuan Polisi Pamong Praja	603.825.040,00
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Tingkat waktu tanggap (Response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		
				Satuan Polisi Pamong Praja	4.998.389.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilakukan sangat tepat		
				Satuan Polisi Pamong Praja	21.315.643.436,00
			PERSENTASE DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG TERLAYANI		
				Dinas Sosial	9.084.529.296,00
			Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan Sangat Tepat		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	6.303.592.605,00
			Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Sangat Tepat		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	729.539.901,00
			Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Sangat Tepat		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	149.519.000,00
			Persentase Pengelolaan Kepehawaian yang dilaksanakan Tepat Waktu		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	298.817.000,00
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	122.299.000,00
			Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Dilaksanakan Tepat Waktu dan Akuntabel		
				Dinas Ketahanan Pangan	625.829.520,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran		
				Dinas Ketahanan Pangan	861.540.853,00
			Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang Dilaksanakan Tepat Waktu		
				Dinas Ketahanan Pangan	621.264.556,00
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik		
				Dinas Ketahanan Pangan	5.068.551.531,00
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
			Jumlah Desa yang melakukan kerjasama		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	138.223.000,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Desa Tertib Administrasi		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.083.060.286,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Keluarga Inklusif yang dibina		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.556.272.774,00
			Jumlah Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat yang dibina		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.556.272.774,00
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang dibina		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.556.272.774,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan sangat tepat		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	496.325.500,00
			Persentase pemenuhan layanan administrasi		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	120.000.000,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	910.681.700,00
			Persentase Pengelolaan Kepegawaian Yang Dilaksanakan Tepat Waktu		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100.616.630,00
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.605.771.843,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran		
				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.207.666.174,00
			Persentase terlaksananya urusan penunjang pemerintah daerah		
				Dinas Perhubungan	11.912.709.637,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Persentase informasi pemerintahan yang disampaikan kepada publik		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	8.890.472.742,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Persentase aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	7.063.709.082,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
			Persentase keamanan informasi Pemerintah Daerah		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	1.282.600.401,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Dinas Komunikasi dan Informatika	9.041.448.619,00
			Persentase Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	9.041.448.619,00
			Persentase pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	125.024.000,00
			Persentase pemenuhan layanan administrasi		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	760.984.000,00
			Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	196.337.400,00
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	601.608.934,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.633.167.050,00
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dibidang Pelayanan Perizinan		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.633.167.050,00
			Persentase Penerbitan Izin dan non perizinan Sesuai SOP		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.633.167.050,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	239.208.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	766.733.200,00
			Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu dan Akuntabe		
				Dinas Perikanan	114.282.236,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran		
				Dinas Perikanan	6.575.239.703,00
			Persentase Pengelolaan Kepegawaian Yang Dilaksanakan Tepat Waktu		
				Dinas Perikanan	135.795.000,00
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik		
				Dinas Perikanan	1.575.471.522,00
			Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel		
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	20.178.442.418,00
			Persentase Pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran		
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.355.459.617,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	46.076.100,00
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	311.529.725,00
			[deleted]		
				Dinas Perkebunan	8.539.501.930,00
			Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Dilaksanakan Tepat Waktu dan Akuntabel		
				Dinas Perkebunan	1.370.430.667,00
			Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan Tepat Waktu		
				Dinas Perkebunan	6.330.685.633,00
			Persentase Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani (NTP-R)		
				Dinas Perkebunan	147.936.000,00
			Pesentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel, Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran, Persentase Pengelolaan Kepegawaian dilaksanakan tepat waktu, Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik		
				Dinas Perkebunan	466.632.800,00
			Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Dilaksanakan Tepat Waktu dan Akuntabel		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8.144.103.874,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	759.833.180,00
			Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang Dilaksanakan Tepat Waktu		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.143.450.477,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Jumlah Batas Wilayah Daerah yang jelas dan terselesaikan		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Sekretariat Daerah	18.437.106.817,00
			Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri		
				Sekretariat Daerah	18.437.106.817,00
			Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan Hukum		
				Sekretariat Daerah	18.437.106.817,00
			Jumlah pasangan Isbat Nikah warga Kab. Musi banyuasin yang kurang mampu		
				Sekretariat Daerah	18.437.106.817,00
			Jumlah peserta STQ dan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi		
				Sekretariat Daerah	18.437.106.817,00
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun		
				Sekretariat Daerah	18.437.106.817,00
			Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten		
				Sekretariat Daerah	21.051.766.173,00
			Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)		
				Sekretariat Daerah	18.437.106.817,00
			Terbinanya Sarjana Bina Desa		
				Sekretariat Daerah	18.437.106.817,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		
				Sekretariat Daerah	2.268.851.450,00
			Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan		
				Sekretariat Daerah	2.916.564.450,00
			Jumlah pemetaan potensi sumber daya alam		
				Sekretariat Daerah	2.916.564.450,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik		
				Sekretariat Daerah	2.268.851.450,00
			Jumlah rekomendasi izin pertambangan		
				Sekretariat Daerah	2.899.463.450,00
			Laporan Inflasi secara periode		
				Sekretariat Daerah	2.268.851.450,00
			Standar Satuan Harga (SSH)		
				Sekretariat Daerah	2.268.851.450,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
				Sekretariat Daerah	73.840.740.731,00
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang tepat dan cepat		
				Sekretariat Daerah	69.605.250.939,00
			Meningkatnya Jumlah sarana dan prasarana fasilitas kerja (Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas)		
				Sekretariat Daerah	69.605.250.939,00
			Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten dan Indeks Reformasi Birokrasi		
				Sekretariat Daerah	69.605.250.939,00
			Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah		
				Sekretariat Daerah	27.261.587.611,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
				Sekretariat Daerah	60.924.843.728,00
			Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		
				Sekretariat Daerah	20.753.460.325,00
			Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Sekretariat Daerah	21.590.203.003,00
			Persentase terlayannya Kunjungan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		
				Sekretariat Daerah	69.605.250.939,00
			Persentase Tersusunnya Analisa Jabatan Perangkat Daerah dalam Kab. Muba		
				Sekretariat Daerah	8.680.407.211,00
			Terbentuknya inovasi pelayanan publik perangkat daerah dan tersertifikasinya pelayanan publik perangkat daerah dengan standar ISO		
				Sekretariat Daerah	69.605.250.939,00
			Terpeliharanya jumlah aset tetap/aset tak berwujud milik daerah		
				Sekretariat Daerah	69.605.250.939,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD		
				Sekretariat DPRD	38.736.777.649,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel		
				Sekretariat DPRD	45.277.706.340,00
			Persentase Layanan Keuangan, Administrasi dan Kesejahteraan DPRD		
				Sekretariat DPRD	59.855.197.668,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran		
				Sekretariat DPRD	2.045.455.178,00
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik		
				Sekretariat DPRD	12.532.036.150,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sekayu)		
				Kecamatan Sekayu	660.083.783,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Sekayu		
				Kecamatan Sekayu	0,00
			Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
				Kecamatan Sekayu	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Terselenggaranya Penegakan Peraturan Daerah		
				Kecamatan Sekayu	24.929.730,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sekayu		
				Kecamatan Sekayu	99.960.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Kecamatan Sekayu	936.844.378,00
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat		
				Kecamatan Sekayu	936.844.378,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Sekayu	7.361.482.902,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase Fasilitas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
				Kecamatan Lais	470.987.000,00
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lais)		
				Kecamatan Lais	470.987.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Lais		
				Kecamatan Lais	45.300.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lais)		
				Kecamatan Lais	34.470.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Lais		
				Kecamatan Lais	95.400.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
				Kecamatan Lais	4.085.866.148,00
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat		
				Kecamatan Lais	4.085.866.148,00
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
				Kecamatan Babat Toman	34.999.881,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Keluang)		
				Kecamatan Keluang	535.019.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Keluang		
				Kecamatan Keluang	10.650.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Keluang)		
				Kecamatan Keluang	14.015.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Keluang		
				Kecamatan Keluang	20.300.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Layanan dan Perkantoran		
				Kecamatan Keluang	3.479.338.456,00
			Persentase pemenuhan layanan administrasi		
				Kecamatan Keluang	482.130.667,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan		
				Kecamatan Sanga Desa	490.024.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Sanga Desa		
				Kecamatan Sanga Desa	18.300.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan		
				Kecamatan Sanga Desa	25.005.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sanga Desa		
				Kecamatan Sanga Desa	39.128.499,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat		
				Kecamatan Sanga Desa	3.463.094.014,00
			Persentase pemenuhan Layanan Administrasi		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Sanga Desa	490.476.002,00
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Kecamatan Sanga Desa	700.898.800,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi)		
				Kecamatan Plakat Tinggi	522.224.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Plakat Tinggi		
				Kecamatan Plakat Tinggi	10.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
				Kecamatan Batanghari Leko	528.384.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat (Kec. Batanghari Leko)		
				Kecamatan Batanghari Leko	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Kec. Batanghari Leko)		
				Kecamatan Batanghari Leko	14.412.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Batanghari Leko)		
				Kecamatan Batanghari Leko	11.712.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Batanghari Leko		
				Kecamatan Batanghari Leko	20.492.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Kecamatan Batanghari Leko	3.258.838.954,00
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat, Persentase pemenuhan layanan administrasi, Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Kecamatan Batanghari Leko	2.841.889.121,00
			Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran		
				Kecamatan Batanghari Leko	416.949.833,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Keruh)		
				Kecamatan Sungai Keruh	491.910.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Sungai Keruh		
				Kecamatan Sungai Keruh	21.650.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Sungai Keruh)		
				Kecamatan Sungai Keruh	20.006.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sungai Keruh		
				Kecamatan Sungai Keruh	40.586.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat, Persentase pemenuhan layanan administrasi, Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam keadaan baik		
				Kecamatan Sungai Keruh	2.540.587.537,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Sungai Keruh	589.192.349,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Lilin)		
				Kecamatan Sungai Lilin	537.584.000,00
			Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan (Kelurahan Sungai Lilin dan Kelurahan Sungai Lilin Jaya)		
				Kecamatan Sungai Lilin	5.000.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Sungai Lilin		
				Kecamatan Sungai Lilin	5.040.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Sungai Lilin)		
				Kecamatan Sungai Lilin	5.040.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sungai Lilin		
				Kecamatan Sungai Lilin	20.160.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Kecamatan Sungai Lilin	4.405.966.885,00
			Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan Dilaksanakan Sangat Tepat Waktu		
				Kecamatan Sungai Lilin	411.982.064,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Sungai Lilin	4.000.648.332,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Bayung Lencir)		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Bayung Lencir	528.529.600,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			persentase penegakan peraturan daerah kecamatan bayung lencir		
				Kecamatan Bayung Lencir	9.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Bayung Lencir)		
				Kecamatan Bayung Lencir	11.740.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Bayung Lencir		
				Kecamatan Bayung Lencir	25.965.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Kecamatan Bayung Lencir	2.942.673.918,00
			peresentase kualitas pelayanan masyarakat		
				Kecamatan Bayung Lencir	94.674.000,00
			persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan, persentase pemenuhan layanan administrasi, persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu persentase saran dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Kecamatan Bayung Lencir	2.847.999.918,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lalan)		
				Kecamatan Lalan	760.380.000,00
			Persentase penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan		
				Kecamatan Lalan	28.700.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kec. Lalan)		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Lalan	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lalan)		
				Kecamatan Lalan	9.290.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Jumlah Desa yang dibina (Kec. Lalan)		
				Kecamatan Lalan	18.580.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan, Persentase pemenuhan layanan administrasi, Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Kecamatan Lalan	2.933.541.619,00
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat, Persentase pemenuhan layanan administrasi, Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Kecamatan Lalan	161.733.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Tungkal Jaya)		
				Kecamatan Tungkal Jaya	452.611.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Tungkal Jaya		
				Kecamatan Tungkal Jaya	23.820.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase Penyelesaian Konflik di wilayah kecamatan		
				Kecamatan Tungkal Jaya	23.820.000,00
			Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Tungkal Jaya)		
				Kecamatan Tungkal Jaya	23.820.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Tungkal Jaya		
				Kecamatan Tungkal Jaya	159.498.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat		
				Kecamatan Tungkal Jaya	3.788.606.202,00
			Persentase Pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat Persentase pemenuhan layanan administrasi Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Kecamatan Tungkal Jaya	271.830.400,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lawang Wetan)		
				Kecamatan Lawang Wetan	4.950.000,00
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lawang Wetan) [deleted]		
				Kecamatan Lawang Wetan	471.700.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
				Kecamatan Lawang Wetan	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. lawang Wetan		
				Kecamatan Lawang Wetan	16.800.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lawang Wetan)		
				Kecamatan Lawang Wetan	16.800.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Lawang Wetan		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Lawang Wetan	27.540.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Tata Kelola Pemerintahan		
				Kecamatan Lawang Wetan	603.811.071,00
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lawang Wetan)		
				Kecamatan Lawang Wetan	379.215.569,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Babat Supat)		
				Kecamatan Babat Supat	492.852.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kecamatan Babat Supat		
				Kecamatan Babat Supat	13.760.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Babat Supat)		
				Kecamatan Babat Supat	7.747.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Babat Supat		
				Kecamatan Babat Supat	55.040.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Layanan dan Perkantoran		
				Kecamatan Babat Supat	939.012.526,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Jirak Jaya)		
				Kecamatan Jirak Jaya	502.385.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa		
				Kecamatan Jirak Jaya	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Jirak		
				Kecamatan Jirak Jaya	30.480.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec.Jirak Jaya)		
				Kecamatan Jirak Jaya	13.815.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Jirak Jaya		
				Kecamatan Jirak Jaya	28.320.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase layanan dan perkantoran		
				Kecamatan Jirak Jaya	394.704.498,00
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat, Persentase pemenuhan layanan administrasi, Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Kecamatan Jirak Jaya	339.896.383,00
			Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran		
				Kecamatan Jirak Jaya	1.335.325.144,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Opini terhadap laporan keuangan pemda		
				Inspektorat	3.599.999.200,00
			Persentase PD yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB		
				Inspektorat	3.599.999.200,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat		
				Inspektorat	3.599.999.200,00
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti		
				Inspektorat	3.599.999.200,00
			Persentase Unit Pelayanan Publik Kategori Baik		
				Inspektorat	3.599.999.200,00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
			Level Kapabilitas APIP		
				Inspektorat	1.500.000.800,00
			Nilai Maturitas SPIP		
				Inspektorat	1.500.000.800,00
			Nilai Reformasi Birokrasi PEMDA		
				Inspektorat	1.500.000.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu		
				Inspektorat	454.438.000,00
			Persentase pemenuhan layanan administrasi		
				Inspektorat	867.923.600,00
			Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
				Inspektorat	17.504.890.857,00
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Inspektorat	1.693.848.133,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1.162.500.000,00
			Persentase Pencairan Dana On Schedul		
				Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	500.024.083.028,00
			Persentase SKPD Yang Penganggarannya Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)		
				Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1.000.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Persentase Data Aset Yang Akurat		
				Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	2.171.453.529,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan Akuntabel		
				Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	85.000.033,00
			Persentase pemenuhan layanan Keuangan dan administrasi perkantoran		
				Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	2.494.302.092,00
			Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
				Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	220.836.000,00
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	3.537.397.038,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
				Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	5.795.600.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan Tepat Waktu dan Akuntabel		
				Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.381.724.711,00
			Persentase Pengelolaan Kepegawaian dilaksanakan tepat waktu		
				Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	23.020.140.985,00
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik		
				Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.250.000.000,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Persentase Capaian Kinerja ASN yang Memiliki Capaian Kinerja baik		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.689.997.850,00
			Persentase Capaian Kinerja ASN yang Memiliki Capaian Kinerja Baik		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	574.302.700,00
			Persentase JPT yang mempunyai Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	6.264.300.550,00
			Persentase Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	6.264.300.550,00
			Persentase Penempatan ASN sesuai dengan Standar Jabatan		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	6.264.300.550,00
			Survey Kepuasan ASN		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	7.294.300.550,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan sangat tepat		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	524.510.000,00
			Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	155.376.200,00
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	938.785.127,00
			Persentasi Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	212.546.000,00
			Persentese Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	747.803.222,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan		
				Kelurahan Balai Agung	150.000.000,00
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan		
				Kelurahan Ngulak I	149.588.543,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Sanga Desa		
				Kelurahan Ngulak I	699.131.605,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan		
				Kelurahan Ngulak	149.708.288,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kelurahan Ngulak	698.856.278,00
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur				
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Persentase Capaian Penanggulangan Bencana (100%)		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.899.997.071,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.687.826.964,00
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase Penyelesaian Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup		
				Dinas Lingkungan Hidup	800.000.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dicapai		
				Dinas Lingkungan Hidup	1.550.415.924,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin Lingkungan dan izin PPLH		
				Dinas Lingkungan Hidup	253.735.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Persentase Penanganan sampah		
				Dinas Lingkungan Hidup	10.223.741.437,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Bidang Lingkungan Hidup		
				Dinas Lingkungan Hidup	129.988.000,00
			Terlaksananya penunjang urusan Bidang Lingkungan Hidup		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Lingkungan Hidup	10.904.038.131,00
			Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Lingkungan Hidup		
				Dinas Lingkungan Hidup	19.077.077.163,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
				Kecamatan Lais	4.950.000,00
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lais)		
				Kecamatan Lais	4.950.000,00

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
1	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	89.916.600,00
			Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.980.200,00
			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.980.200,00
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.980.200,00
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.980.200,00
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.980.200,00
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	152.648.700,00
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100.000.000,00
			Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.980.200,00
			Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.980.200,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.980.200,00
			Persentase sekolah yang sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM)		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.980.200,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Pembinaan Sanggar/Komunitas Seni Budaya		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	326.408.000,00
			Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	326.408.000,00
			Penyelenggaraan festival seni dan budaya		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	326.408.000,00
			Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	326.408.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
			Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	275.000.000,00
			Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	275.000.000,00
			Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	275.000.000,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	299.995.000,00
			Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	299.995.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
			Jumlah kegiatan yang di laksanakan dan jumlah koleksi		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	345.716.000,00
			Jumlah Koleksi		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	345.716.000,00
			Jumlah Kunjungan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	345.716.000,00
			Penyelenggaraan Kegiatan yang di laksanakan di Museum		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	345.716.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Persentase pengelolaan bantuan keuangan sektor pendidikan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.105.969.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29.993.640,00
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	139.787.000,00
			Persentase pemenuhan Layanan Administrasi		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.000.000,00
			Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29.993.640,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Angka kematian bayi		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kesehatan	33.820.000,00
			Angka kematian ibu		
				Dinas Kesehatan	33.820.000,00
			Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jaringan		
				Dinas Kesehatan	33.820.000,00
			Jumlah FKRTL Akreditasi Paripurna		
				Dinas Kesehatan	470.009.000,00
			Jumlah FKTP Akreditasi Minimal Utama		
				Dinas Kesehatan	33.820.000,00
			Jumlah Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
				Dinas Kesehatan	33.820.000,00
			Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas		
				Dinas Kesehatan	33.820.000,00
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular		
				Dinas Kesehatan	33.820.000,00
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular		
				Dinas Kesehatan	33.820.000,00
			Jumlah Pelayanan Standard Minimal Kesehatan		
				Dinas Kesehatan	33.820.000,00
			Persentase Alat Kesehatan Memenuhi Syarat		
				Dinas Kesehatan	33.820.000,00
			Persentase Alat Kesehatan yang di lakukan pemeliharaan atau kalibrasi		
				Dinas Kesehatan	33.820.000,00
			Persentase Jaminan Kesehatan Masyarakat		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kesehatan	470.009.000,00
			Persentase ketersediaan BMHP		
				Dinas Kesehatan	33.820.000,00
			Persentase ketersediaan obat esensial		
				Dinas Kesehatan	33.820.000,00
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau berpotensi bencana		
				Dinas Kesehatan	470.009.000,00
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana (FKTP dan FKTR)		
				Dinas Kesehatan	100.000.000,00
			Prevalensi stunting pada balita		
				Dinas Kesehatan	33.820.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase Puskesmas dengan jenis Nakes sesuai Standar		
				Dinas Kesehatan	39.695.000,00
			Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya		
				Dinas Kesehatan	39.695.000,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Persentase sertifikasi tempat pengelolaan makanan dan minuman		
				Dinas Kesehatan	33.200.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		
				Dinas Kesehatan	86.014.980,00
			Persentase desa yang melaksanakan PHBS		
				Dinas Kesehatan	86.014.980,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase PHBS tempat kerja		
				Dinas Kesehatan	86.014.980,00
			Persentase Rumah Sehat		
				Dinas Kesehatan	86.014.980,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Dinas Kesehatan	30.000.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL		
				Dinas Kesehatan	40.000.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL		
				Dinas Kesehatan	30.000.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Dinas Kesehatan	30.000.000,00
			Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu		
				Dinas Kesehatan	100.000.000,00
			Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dilaksanakan dengan tepat		
				Dinas Kesehatan	40.000.000,00
			Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
				Dinas Kesehatan	30.000.000,00
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Dinas Kesehatan	69.890.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase PMKS yang mendapat Layanan		
				Dinas Sosial	60.305.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase Masyarakat Kurang Mampu (DTKS) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga		
				Dinas Sosial	342.959.800,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten		
				Dinas Sosial	367.767.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			PERSENTASE DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG TERLAYANI		
				Dinas Sosial	19.320.000,00
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
			Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	418.587.050,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.158.246.600,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase Pekerja yang ditempatkan		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	51.928.000,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Tahunan		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	177.129.000,00
			Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	177.129.000,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	185.060.000,00
			Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Menerapkan PUG melalui PPRG		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	185.060.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	209.710.000,00
			Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	63.251.246,00
			Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	63.251.246,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Jumlah Penghargaan Nasional Kabupaten Layak Anak (KLA)		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	93.558.000,00
			penguatan dan pengembangan lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	93.558.000,00
			Persentase Kecamatan Layak Anak		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	93.558.000,00
			Persentase Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah non pemerintah dan Dunia Usaha		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	248.500.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	93.558.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	200.843.500,00
			Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap anak dan dampingan korban bagi anak memerlukan perlindungan khusus		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	200.843.500,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Tingkat Konsumsi Energi PerKapita/Hari		
				Dinas Ketahanan Pangan	46.405.000,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Persentase Desa Rawan Pangan (Prioritas 1,2,3)		
				Dinas Ketahanan Pangan	81.902.388,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Persentase Pangan Segar Aman Dikonsumsi		
				Dinas Ketahanan Pangan	66.450.900,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			Jumlah peta persebaran penggunaan alat kontrasepsi		
				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	66.469.867,00
			Persentase Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)		
				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	66.469.867,00
			Persentase stakeholder yang memahami kajian dampak kependudukan.		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	66.469.867,00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	49.291.203,00
			Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi		
				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	49.291.203,00
			Persentase Kebutuhan KB Yang Tidak Terpenuhi		
				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	49.291.203,00
			Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE)		
				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	49.291.203,00
			Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)		
				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	49.291.203,00
			Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB		
				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	49.291.203,00
			Persentase Penggerakan dan Wawasan Masyarakat Tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana		
				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	49.291.203,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			Cakupan Peran Serta Organisasi dan Masyarakat Yang di Bina		
				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	154.528.000,00
			Persentase Jumlah Kelompok PIK-R, BKR, BKB, BKL dan UPPKS Yang Dibina		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	154.528.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran		
				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	38.713.950,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Persentase pemuda yang bebas narkoba		
				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	614.690.000,00
			Persentase pemuda yang berwirausaha terhadap pemuda yang dibina		
				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	207.637.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga		
				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	85.006.000,00
			Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk		
				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	85.006.000,00
			Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk.		
				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	27.378.966.823,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
			Persentase Organisasi Kepramukaan yang terakreditasi		
				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	103.670.500,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Jumlah objek wisata		
				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	1.319.020.000,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Jumlah kunjungan wisatawan		
				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	1.729.791.600,00
			Jumlah pelaku usaha pariwisata		
				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	1.729.791.600,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Meningkatnya budaya gemar membaca Tingkat Daerah		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	156.021.032,00
			Meningkatnya budaya gemar membaca Tingkat Daerah [deleted]		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	71.725.365,00
			Terbinanya Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	71.725.365,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Produksi Perikanan Tangkap		
				Dinas Perikanan	89.683.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Produksi Perikanan Budidaya		
				Dinas Perikanan	98.230.950,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Tingkat Partisipasi Pokmaswas		
				Dinas Perikanan	162.548.867,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Konsumsi Ikan		
				Dinas Perikanan	316.710.200,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase ketersediaan prasarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan)		
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	204.640.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Persentase serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang di tangani		
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	355.110.000,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani		
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	396.919.782,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	20.000.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan		
				Dinas Perkebunan	100.538.000,00
			Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan		
				Dinas Perkebunan	230.476.500,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan		
				Dinas Perkebunan	200.049.000,00
			Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan		
				Dinas Perkebunan	200.049.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Bencana Perkebunan		
				Dinas Perkebunan	45.000.000,00
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
			Persentase Pelaku Usaha Perkebunan Mendapatkan Kejelasan Status Usahnya		
				Dinas Perkebunan	385.839.000,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Persentase Penggunaan Teknologi yang diterapkan oleh petani		
				Dinas Perkebunan	100.412.750,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			[deleted]		
				Dinas Perkebunan	19.017.000,00
			Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Dilaksanakan Tepat Waktu dan Akuntabel		
				Dinas Perkebunan	191.664.000,00
			Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan Tepat Waktu		
				Dinas Perkebunan	68.288.750,00
			Persentase Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani (NTP-R)		
				Dinas Perkebunan	22.880.000,00
			Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel, Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran, Persentase Pengelolaan Kepegawaian dilaksanakan tepat waktu, Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik		
				Dinas Perkebunan	60.449.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
				Kecamatan Lais	4.950.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lais)		
				Kecamatan Lais	4.950.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Lais		
				Kecamatan Lais	22.650.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lais)		
				Kecamatan Lais	17.235.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Lais		
				Kecamatan Lais	22.050.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
				Kecamatan Lais	9.855.000,00
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat		
				Kecamatan Lais	9.855.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Angka kematian bayi		
				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	2.500.000.000,00
			Angka kematian ibu		
				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	2.500.000.000,00
			Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jaringan		
				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	2.500.000.000,00
			Jumlah FKRTL Akreditasi Paripurna		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	2.500.000.000,00
			Jumlah FKTP Akreditasi Minimal Utama		
				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	2.500.000.000,00
			Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas		
				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	2.500.000.000,00
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular		
				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	2.500.000.000,00
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular		
				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	2.500.000.000,00
			Jumlah Pelayanan Standard Minimal Kesehatan		
				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	2.500.000.000,00
			Persentase Alat Kesehatan Memenuhi Syarat		
				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	2.500.000.000,00
			Persentase Alat Kesehatan yang di lakukan pemeliharaan atau kalibrasi		
				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	2.500.000.000,00
			Persentase ketersediaan BMHP		
				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	2.500.000.000,00
			Persentase ketersediaan obat esensial		
				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	2.500.000.000,00
			Prevalensi stunting pada balita		
				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	2.500.000.000,00
			Angka kematian bayi		
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	2.500.000.000,00
			Angka kematian ibu		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	2.500.000.000,00
			Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jaringan		
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	2.500.000.000,00
			Jumlah FKRTL Akreditasi Paripurna		
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	2.500.000.000,00
			Jumlah FKTP Akreditasi Minimal Utama		
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	2.500.000.000,00
			Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas		
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	2.500.000.000,00
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular		
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	2.500.000.000,00
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular		
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	2.500.000.000,00
			Jumlah Pelayanan Standard Minimal Kesehatan		
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	2.500.000.000,00
			Persentase Alat Kesehatan Memenuhi Syarat		
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	2.500.000.000,00
			Persentase Alat Kesehatan yang di lakukan pemeliharaan atau kalibrasi		
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	2.500.000.000,00
			Persentase ketersediaan BMHP		
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	2.500.000.000,00
			Persentase ketersediaan obat essensial		
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	2.500.000.000,00
			Prevalensi stunting pada balita		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	2.500.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL		
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	25.000.000.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	25.000.000.000,00
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	25.000.000.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL		
				Puskesmas Babat Toman	2.662.818.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Babat Toman	2.662.818.000,00
			Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu		
				Puskesmas Babat Toman	2.662.818.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL		
				Puskesmas Ulak Paceh	2.661.842.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Ulak Paceh	2.661.842.000,00
			Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu		
				Puskesmas Ulak Paceh	2.661.842.000,00
				Puskesmas Cinta Karya	1.200.914.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL		
				Puskesmas Cinta Karya	1.200.914.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Cinta Karya	1.200.914.000,00
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Puskesmas Cinta Karya	1.200.914.000,00
				Puskesmas Suka Damai	1.078.177.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL		
				Puskesmas Suka Damai	1.078.177.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Suka Damai	1.078.177.000,00
			Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
				Puskesmas Suka Damai	1.078.177.000,00
			undefined		
				Puskesmas Tebing Bulang	2.422.058.000,00
				Puskesmas Jirak	1.404.263.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL		
				Puskesmas Jirak	1.404.263.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Jirak	1.404.263.000,00
			Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Daerah (BMH) tepat waktu		
				Puskesmas Jirak	1.404.263.000,00
			undefined		
				Puskesmas Jirak	1.404.263.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Puskesmas Balai Agung	3.734.530.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL		
				Puskesmas Balai Agung	3.734.530.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Balai Agung	3.734.530.000,00
			Peningkatan Pelayanan BLUD		
				Puskesmas Balai Agung	3.734.530.000,00
			Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Daerah (BMH) tepat waktu		
				Puskesmas Balai Agung	3.734.530.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL		
				Puskesmas Lais	2.783.134.500,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Lais	2.783.134.500,00
			Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Daerah (BMH) tepat waktu		
				Puskesmas Lais	2.783.134.500,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL		
				Puskesmas Gardu Harapan	932.395.500,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Gardu Harapan	932.395.500,00
			Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor		
				Puskesmas Gardu Harapan	932.395.500,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL		
				Puskesmas Tanjung Kerang	1.709.166.800,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Tanjung Kerang	1.709.166.800,00
			Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu		
				Puskesmas Tanjung Kerang	1.709.166.800,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL		
				Puskesmas Sungai Lilin	2.947.935.700,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Sungai Lilin	2.947.935.700,00
			Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dilaksanakan dengan tepat		
				Puskesmas Sungai Lilin	2.947.935.700,00
				Puskesmas Karya Maju	1.821.514.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL		
				Puskesmas Karya Maju	1.821.514.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL		
				Puskesmas Karya Maju	1.821.514.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Karya Maju	1.821.514.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Karya Maju	1.821.514.000,00
			Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu		
				Puskesmas Karya Maju	1.821.514.000,00
			Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dilaksanakan dengan tepat		
				Puskesmas Karya Maju	1.821.514.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL		
				Puskesmas Suka Jaya	1.473.013.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Suka Jaya	1.473.013.000,00
			Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
				Puskesmas Suka Jaya	1.473.013.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Berojaya Timur	1.013.775.000,00
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Puskesmas Berojaya Timur	1.013.775.000,00
				Puskesmas Bayung Lencir	4.689.370.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL		
				Puskesmas Bayung Lencir	4.689.370.000,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Bayung Lencir	4.689.370.000,00
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Puskesmas Bayung Lencir	4.689.370.000,00
				Puskesmas Air Balui	605.263.500,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL		
				Puskesmas Air Balui	605.263.500,00
			Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP		
				Puskesmas Air Balui	605.263.500,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu		
				Puskesmas Air Balui	605.263.500,00
2	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase keselarasan program RKPD dalam RPJMD		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	40.486.000,00
			Presentase keselarasan program kabupaten dengan program nasional		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	212.980.894,00
			Rasio ketersediaan data untuk untuk perencanaan pembangunan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	212.980.894,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase program/kegiatan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.770.000,00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase Hasil Inovasi yang diimplementasikan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	90.068.146,00
			Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti [deleted]		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	273.378.346,00
			Presentasi hasil inovasi yang diimplementasikan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	159.929.981,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Dilaksanakan Sangat Tepat		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	74.850.000,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	76.694.000,00
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17.464.260,00
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	435.508.260,00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.201.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			Tersedianya dokumen laporan analisa stabilitas politik		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	150.139.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			Persentase Organisasi Masyarakat yang dibina		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	150.062.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
			Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	399.937.890,00
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	84.250.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.640.000,00
			Persentase Layanan Adminitrasi dan Perkantoran		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	34.230.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentrman, dan Keindahan) di Kabupaten		
				Satuan Polisi Pamong Praja	38.715.250,00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota		
				Satuan Polisi Pamong Praja	44.843.040,00
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Tingkat waktu tanggap (Response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		
				Satuan Polisi Pamong Praja	643.389.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilakukan sangat tepat		
				Satuan Polisi Pamong Praja	8.397.874,00
			Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan Sangat Tepat		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	19.963.364,00
			Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Sangat Tepat		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	250.658.568,00
			Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Sangat Tepat		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	37.164.000,00
			Persentase Pengelolaan Kepehawaian yang dilaksanakan Tepat Waktu		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	25.490.000,00
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	19.320.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.808.000,00
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	32.274.000,00
			Persentase pemenuhan Layanan Administrasi		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24.968.340,00
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.808.000,00
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.912.850,00
			Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Dilaksanakan Tepat Waktu dan Akuntabel		
				Dinas Ketahanan Pangan	24.400.000,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran		
				Dinas Ketahanan Pangan	29.965.373,00
			Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang Dilaksanakan Tepat Waktu		
				Dinas Ketahanan Pangan	79.209.000,00
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik		
				Dinas Ketahanan Pangan	30.020.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Persentase capaian terlaksananya Informasi Administrasi Kependudukan yang mudah diakses oleh masyarakat		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	91.559.690,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
			Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	108.176.708,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.000.000,00
			Jumlah Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.000.000,00
			Persentase Layanan Umum Perangkat Daerah		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30.000.000,00
			Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.985.404.269,00
			Persentase PengelolaanKepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	37.280.000,00
			Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.000.000,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran		
				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	20.000.000,00
			Persentase terlaksananya urusan penunjang pemerintah daerah		
				Dinas Perhubungan	20.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Persentase informasi pemerintahan yang disampaikan kepada publik		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	150.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Persentase aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	242.616.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
			Persentase keamanan informasi Pemerintah Daerah		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	395.800.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Dinas Komunikasi dan Informatika	30.000.427,00
			Persentase Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	30.000.427,00
				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	34.219.080,00
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat		
				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	34.219.080,00
			Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		
				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	19.880.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Meningkatnya budaya gemar membaca Tingkat Daerah		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	47.007.828,00
			Meningkatnya budaya gemar membaca Tingkat Daerah [deleted]		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	453.217.333,00
			Terbinanya Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	47.007.828,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	174.783.110,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Terkelolahnya Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	174.783.110,00
			Terkelolahnya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	174.783.110,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	19.997.700,00
			Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu dan Akuntabel		
				Dinas Perikanan	18.118.033,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran		
				Dinas Perikanan	205.458.600,00
			Persentase Pengelolaan Kepegawaian Yang Dilaksanakan Tepat Waktu		
				Dinas Perikanan	34.910.000,00
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik		
				Dinas Perikanan	40.130.000,00
			Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel		
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	20.178.442.418,00
			Persentase Pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran		
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	49.800.000,00
			Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	46.076.100,00
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	42.000.000,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Jumlah Batas Wilayah Daerah yang jelas dan terselesaikan		
				Sekretariat Daerah	48.635.000,00
			Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri		
				Sekretariat Daerah	48.635.000,00
			Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan Hukum		
				Sekretariat Daerah	48.635.000,00
			Jumlah pasangan Isbat Nikah warga Kab. Musi banyuasin yang kurang mampu		
				Sekretariat Daerah	48.635.000,00
			Jumlah peserta STQ dan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi		
				Sekretariat Daerah	48.635.000,00
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun		
				Sekretariat Daerah	48.635.000,00
			Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten		
				Sekretariat Daerah	48.635.000,00
			Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)		
				Sekretariat Daerah	48.635.000,00
			Terbinanya Sarjana Bina Desa		
				Sekretariat Daerah	48.635.000,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		
				Sekretariat Daerah	161.392.000,00
			Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Sekretariat Daerah	161.392.000,00
			Jumlah pemetaan potensi sumber daya alam		
				Sekretariat Daerah	161.392.000,00
			Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik		
				Sekretariat Daerah	161.392.000,00
			Jumlah rekomendasi izin pertambangan		
				Sekretariat Daerah	31.056.000,00
			Laporan Inflasi secara periode		
				Sekretariat Daerah	161.392.000,00
			Standar Satuan Harga (SSH)		
				Sekretariat Daerah	161.392.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
				Sekretariat Daerah	8.600.000,00
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang tepat dan cepat		
				Sekretariat Daerah	8.600.000,00
			Meningkatnya Jumlah sarana dan prasarana fasilitas kerja (Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas)		
				Sekretariat Daerah	8.600.000,00
			Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten dan Indeks Reformasi Birokrasi		
				Sekretariat Daerah	8.600.000,00
			Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah		
				Sekretariat Daerah	50.712.528,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
				Sekretariat Daerah	40.680.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		
				Sekretariat Daerah	8.600.000,00
			Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
				Sekretariat Daerah	40.680.000,00
			Persentase terlayannya Kunjungan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		
				Sekretariat Daerah	8.600.000,00
			Persentase Tersusunnya Analisa Jabatan Perangkat Daerah dalam Kab. Muba		
				Sekretariat Daerah	8.600.000,00
			Terbentuknya inovasi pelayanan publik perangkat daerah dan tersertifikasinya pelayanan publik perangkat daerah dengan standar ISO		
				Sekretariat Daerah	8.600.000,00
			Terpeliharanya jumlah aset tetap/aset tak berwujud milik daerah		
				Sekretariat Daerah	8.600.000,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD		
				Sekretariat DPRD	250.550.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel		
				Sekretariat DPRD	40.000.000,00
			Persentase Layanan Keuangan, Administrasi dan Kesejahteraan DPRD		
				Sekretariat DPRD	40.000.000,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran		
				Sekretariat DPRD	2.045.455.178,00
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik		
				Sekretariat DPRD	2.520.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sekayu)		
				Kecamatan Sekayu	90.073.183,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Sekayu		
				Kecamatan Sekayu	0,00
			Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
				Kecamatan Sekayu	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Terselenggaranya Penegakan Peraturan Daerah		
				Kecamatan Sekayu	24.929.730,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sekayu		
				Kecamatan Sekayu	49.960.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Kecamatan Sekayu	14.695.000,00
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat		
				Kecamatan Sekayu	14.695.000,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Sekayu	49.195.000,00
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
				Kecamatan Babat Toman	14.992.520,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Keluang)		
				Kecamatan Keluang	4.995.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Keluang		
				Kecamatan Keluang	10.650.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Keluang)		
				Kecamatan Keluang	14.015.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Keluang		
				Kecamatan Keluang	9.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Layanan dan Perkantoran		
				Kecamatan Keluang	9.998.436,00
			Persentase pemenuhan layanan administrasi		
				Kecamatan Keluang	21.130.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan		
				Kecamatan Sanga Desa	13.524.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Sanga Desa		
				Kecamatan Sanga Desa	18.300.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Sanga Desa	12.225.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sanga Desa		
				Kecamatan Sanga Desa	13.628.499,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat		
				Kecamatan Sanga Desa	3.463.094.014,00
			Persentase pemenuhan Layanan Administrasi		
				Kecamatan Sanga Desa	9.988.530,00
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Kecamatan Sanga Desa	14.490.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi)		
				Kecamatan Plakat Tinggi	5.125.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
				Kecamatan Plakat Tinggi	0,00
			Persentasi Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Plakat Tinggi		
				Kecamatan Plakat Tinggi	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Plakat Tinggi		
				Kecamatan Plakat Tinggi	10.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi)		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Plakat Tinggi	10.000.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Plakat Tinggi		
				Kecamatan Plakat Tinggi	10.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat		
				Kecamatan Plakat Tinggi	9.995.449,00
			Persentase pemenuhan Layanan Administrasi		
				Kecamatan Plakat Tinggi	75.001.536,00
			Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
				Kecamatan Plakat Tinggi	49.850.780,00
			Persentase Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi)		
				Kecamatan Plakat Tinggi	10.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
				Kecamatan Batanghari Leko	8.530.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat (Kec. Batanghari Leko)		
				Kecamatan Batanghari Leko	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Kec. Batanghari Leko)		
				Kecamatan Batanghari Leko	14.412.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Batanghari Leko)		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Batanghari Leko	11.712.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Batanghari Leko		
				Kecamatan Batanghari Leko	7.200.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Kecamatan Batanghari Leko	10.000.000,00
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat, Persentase pemenuhan layanan administrasi, Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Kecamatan Batanghari Leko	14.275.500,00
			Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran		
				Kecamatan Batanghari Leko	10.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Keruh)		
				Kecamatan Sungai Keruh	25.610.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Sungai Keruh		
				Kecamatan Sungai Keruh	21.650.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Sungai Keruh)		
				Kecamatan Sungai Keruh	20.006.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sungai Keruh		
				Kecamatan Sungai Keruh	20.006.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat, Persentase pemenuhan layanan administrasi, Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam keadaan baik		
				Kecamatan Sungai Keruh	10.980.000,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Sungai Keruh	5.081.100,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Lilin)		
				Kecamatan Sungai Lilin	537.584.000,00
			Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan (Kelurahan Sungai Lilin dan Kelurahan Sungai Lilin Jaya)		
				Kecamatan Sungai Lilin	5.000.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Sungai Lilin		
				Kecamatan Sungai Lilin	5.040.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Sungai Lilin)		
				Kecamatan Sungai Lilin	5.040.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sungai Lilin		
				Kecamatan Sungai Lilin	7.560.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Kecamatan Sungai Lilin	5.850.000,00
			Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan Dilaksanakan Sangat Tepat Waktu		
				Kecamatan Sungai Lilin	6.663.511,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Sungai Lilin	5.850.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Bayung Lencir)		
				Kecamatan Bayung Lencir	29.182.600,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			persentase penegakan peraturan daerah kecamatan bayung lencir		
				Kecamatan Bayung Lencir	9.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Bayung Lencir)		
				Kecamatan Bayung Lencir	11.740.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Bayung Lencir		
				Kecamatan Bayung Lencir	9.400.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Kecamatan Bayung Lencir	14.974.000,00
			peresentase kualitas pelayanan masyarakat		
				Kecamatan Bayung Lencir	14.974.000,00
			persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan, persentase pemenuhan layanan administrasi, persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu persentase saran dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Kecamatan Bayung Lencir	2.847.999.918,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lalan)		
				Kecamatan Lalan	5.000.000,00
			Persentase penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Lalan	28.700.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kec. Lalan)		
				Kecamatan Lalan	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lalan)		
				Kecamatan Lalan	9.290.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Jumlah Desa yang dibina (Kec. Lalan)		
				Kecamatan Lalan	9.290.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan, Persentase pemenuhan layanan administrasi, Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Kecamatan Lalan	9.999.500,00
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat, Persentase pemenuhan layanan administrasi, Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Kecamatan Lalan	10.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Tungkal Jaya)		
				Kecamatan Tungkal Jaya	5.000.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Tungkal Jaya		
				Kecamatan Tungkal Jaya	23.820.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase Penyelesaian Konflik di wilayah kecamatan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Tungkal Jaya	23.820.000,00
			Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Tungkal Jaya)		
				Kecamatan Tungkal Jaya	23.820.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Tungkal Jaya		
				Kecamatan Tungkal Jaya	23.820.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat		
				Kecamatan Tungkal Jaya	6.710.000,00
			Persentase Pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat Persentase pemenuhan layanan administrasi Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Kecamatan Tungkal Jaya	113.916.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lawang Wetan)		
				Kecamatan Lawang Wetan	4.950.000,00
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lawang Wetan) [deleted]		
				Kecamatan Lawang Wetan	471.700.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
				Kecamatan Lawang Wetan	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. lawang Wetan		
				Kecamatan Lawang Wetan	16.800.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lawang Wetan)		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Lawang Wetan	16.800.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Lawang Wetan		
				Kecamatan Lawang Wetan	12.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Tata Kelola Pemerintahan		
				Kecamatan Lawang Wetan	7.696.998,00
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lawang Wetan)		
				Kecamatan Lawang Wetan	71.798.325,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Babat Supat)		
				Kecamatan Babat Supat	492.852.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kecamatan Babat Supat		
				Kecamatan Babat Supat	13.760.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Babat Supat)		
				Kecamatan Babat Supat	7.747.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Babat Supat		
				Kecamatan Babat Supat	13.760.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Layanan dan Perkantoran		
				Kecamatan Babat Supat	9.780.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Jirak Jaya)		
				Kecamatan Jirak Jaya	19.031.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa		
				Kecamatan Jirak Jaya	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Jirak		
				Kecamatan Jirak Jaya	30.480.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec.Jirak Jaya)		
				Kecamatan Jirak Jaya	13.815.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Jirak Jaya		
				Kecamatan Jirak Jaya	14.160.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase layanan dan perkantoran		
				Kecamatan Jirak Jaya	7.824.000,00
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat, Persentase pemenuhan layanan administrasi, Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Kecamatan Jirak Jaya	9.997.200,00
			Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran		
				Kecamatan Jirak Jaya	11.400.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Opini terhadap laporan keuangan pemda		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Inspektorat	99.999.900,00
			Persentase PD yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB		
				Inspektorat	99.999.900,00
			Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat		
				Inspektorat	99.999.900,00
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti		
				Inspektorat	99.999.900,00
			Persentase Unit Pelayanan Publik Kategori Baik		
				Inspektorat	99.999.900,00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
			Level Kapabilitas APIP		
				Inspektorat	125.001.300,00
			Nilai Maturitas SPIP		
				Inspektorat	125.001.300,00
			Nilai Reformasi Birokrasi PEMDA		
				Inspektorat	125.001.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu		
				Inspektorat	99.718.000,00
			Persentase pemenuhan layanan administrasi		
				Inspektorat	19.999.800,00
			Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
				Inspektorat	58.599.000,00
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Inspektorat	24.867.180,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)		
				Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	40.000.000,00
			Persentase Pencairan Dana On Schedul		
				Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	98.408.900,00
			Persentase SKPD Yang Penganggarannya Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)		
				Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	120.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Persentase Data Aset Yang Akurat		
				Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	84.999.900,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan Akuntabel		
				Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	19.999.979,00
			Persentase pemenuhan layanan Keuangan dan administrasi perkantoran		
				Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	30.000.417,00
			Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
				Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	71.096.000,00
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	45.490.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
				Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	100.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan Tepat Waktu dan Akuntabel		
				Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	84.220.000,00
			Persentase Pengelolaan Kepegawaian dilaksanakan tepat waktu		
				Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	49.979.500,00
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik		
				Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	30.000.000,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Persentase Capaian Kinerja ASN yang Memiliki Capaian Kinerja baik		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	199.999.400,00
			Persentase Capaian Kinerja ASN yang Memiliki Capaian Kinerja Baik		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	30.129.000,00
			Persentase JPT yang mempunyai Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	30.129.000,00
			Persentase Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	30.129.000,00
			Persentase Penempatan ASN sesuai dengan Standar Jabatan		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	30.129.000,00
			Survey Kepuasan ASN		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	30.129.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan sangat tepat		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	18.300.000,00
			Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	46.282.500,00
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	30.023.558,00
			Persentasi Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	51.536.000,00
			Persentese Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	9.936.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan		
				Kelurahan Balai Agung	150.000.000,00
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan		
				Kelurahan Ngulak I	149.588.543,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Sanga Desa		
				Kelurahan Ngulak I	299.131.605,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan		
				Kelurahan Ngulak	149.708.288,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
				Kelurahan Ngulak	349.281.278,00
3	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.000.000,00
			Persentase Jaringan Irigasi, Sungai dan Penampung Air lainnya dalam Kondisi Baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	300.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	430.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			[deleted]		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100.000.000,00
			Persentase Tenaga Jasa Konstruksi yang terlatih dan bersertifikat		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Persentase Ketaatan dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Persentase lampu jalan dalam kondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.070.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.000.000,00
			Persentase Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Air Bersih (Peripaan dan Non Perpipaan)		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.300.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi yang layak (WC Individual, Komunal)		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.160.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
			Persentase Drainase dalam Kondisi Baik		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	18.038.765.186,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Persentase penataan bangunan rumah dan gedung negara kabupaten yang ditangani		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	400.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertangani		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.987.632.400,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Persentase Rumah Korban bencana / Relokasi Yang di Bangun / Di rehab		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.399.610.400,00
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
			Persentase Rumah di Luar Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19.710.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Persentase PSU Yang dibangun / direhab		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	50.000.000,00
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
			Persentase Tanah yang dibebaskan/ diganti rugi oleh PEMDA		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	20.000.000,00
			Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.000.000,00
			Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	67.601.120,00
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	92.295.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
			Jumlah Desa yang melakukan kerjasama		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	58.223.000,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Desa Tertib Administrasi		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	49.952.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Jumlah Keluarga Inklusif yang dibina		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	47.571.000,00
			Jumlah Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat yang dibina		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	47.571.000,00
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang dibina		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	47.571.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan sangat tepat		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30.888.500,00
			Persentase pemenuhan layanan administrasi		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.000.000,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29.787.628,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Pengelolaan Kepegawaian Yang Dilaksanakan Tepat Waktu		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100.616.630,00
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	176.571.396,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Persentase sarana prasarana jalan dalam kondisi baik		
				Dinas Perhubungan	15.004.650,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
			Persentase Sarana Prasarana pelayaran dalam kondisi baik		
				Dinas Perhubungan	60.402.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN			
			Persentase Sarana Prasarana transportasi udara dalam kondisi baik		
				Dinas Perhubungan	88.860.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Jumlah koperasi aktif		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	153.863.800,00
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
			Jumlah Koperasi sehat		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	300.000.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			Jumlah koperasi yang menjalin kerjasama dengan badan usaha lainnya		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	350.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
			Jumlah koperasi yang mampu berdaya saing		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	450.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Jumlah UMK yang berdaya saing		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	50.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Jumlah Usaha Mikro menjadi usaha kecil		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.368.179.850,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25.024.000,00
			Persentase pemenuhan layanan administrasi		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20.000.000,00
			Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	33.140.000,00
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12.440.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Nilai Kinerja PTSP dan Percepatan Pelayanan Berusaha Pemerintah Daerah		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	239.488.000,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
			Minat Investasi		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	624.739.000,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	111.581.700,00
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dibidang Pelayanan Perizinan		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	111.581.700,00
			Persentase Penerbitan Izin dan non perizinan Sesuai SOP		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	111.581.700,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Nilai Realisasi investasi PMA		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90.000.000,00
			Nilai Realisasi investasi PMDN		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	119.604.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	213.187.200,00
			Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40.000.000,00
			Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.999.758,00
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	513.866.667,00
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
			Persentase Rekomendasi Perizinan Pelaku usaha yang terbit		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	71.180.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi Baik		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	4.124.214.850,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Persentase ketersediaan kebutuhan barang pokok dan penting terhadap kebutuhan		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	49.402.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			Persentase peningkatan volume penjualan produk		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	54.643.000,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Persentase UTTP Bertanda Tera Sah		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	146.414.300,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			Jumlah Kemitraan Usaha		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	131.511.050,00
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			persentase peningkatan tenaga kerja industri kecil menengah		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	960.193.977,00
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
			Persentase izin Usaha Industri yang Terkendali		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	59.749.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
			Jumlah Usaha Industri yang terdaftar di SIINas		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	235.629.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Dilaksanakan Tepat Waktu dan Akuntabel		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8.144.103.874,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	41.541.500,00
			Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang Dilaksanakan Tepat Waktu		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	19.812.378,00
4	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana				
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
			Persentase Drainase dalam Kondisi Baik		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	300.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilakukan sangat tepat		
				Satuan Polisi Pamong Praja	1.121.950.000,00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Persentase Capaian Penanggulangan Bencana (100%)		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	51.700.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.872.000,00
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase Penyelesaian Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup		
				Dinas Lingkungan Hidup	800.000.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dicapai		
				Dinas Lingkungan Hidup	99.983.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin Lingkungan dan izin PPLH		
				Dinas Lingkungan Hidup	124.998.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Persentase Penanganan sampah		
				Dinas Lingkungan Hidup	60.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Bidang Lingkungan Hidup		
				Dinas Lingkungan Hidup	20.000.000,00
			Terlaksananya penunjang urusan Bidang Lingkungan Hidup		
				Dinas Lingkungan Hidup	29.998.873,00
			Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Lingkungan Hidup		
				Dinas Lingkungan Hidup	61.614.000,00
				Kecamatan Batanghari Leko	15.600.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat, Persentase pemenuhan layanan administrasi, Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Kecamatan Batanghari Leko	15.600.000,00



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

3.3. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Prioritas Provinsi Sumatera Selatan

Sinkronisasi dengan Provinsi Sumatera Selatan dimulai dengan penyelarasan isu – isu strategis pembangunan daerah antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Provinsi Sumatera Selatan. Tabel 3.3 menunjukkan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3.3

Sinkronisasi Alokasi Pagu Anggaran Prioritas Daerah RKPD 2025 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD KAB. MUBA	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMSEL	
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Rp. 64.554.420.383,-
Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Rp. 663.366.561.626,-
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 1.543.612.809.947,-
Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi		
Meningkatkan Pendapatan dan Mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Kemiskinan		
Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
Transformasi Digital Tata Kelola Pemeritahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Rp. 1.152.319.983.816,-



3.4 Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin

Arah kebijakan pendanaan dan kebijakan belanja APBD Kabupaten Musi Banyuasin “*Money Follow Program*” diprioritaskan untuk :

1. Pos Belanja Wajib dan Mengikat (Belanja Pegawai / Gaji);
2. Belanja wajib berdasar Undang-Undang (Pendidikan, dana desa dan infrastruktur);
3. Belanja dalam rangka pencapaian prioritas RKPD 2025;
4. Belanja dalam penurunan angka kemiskinan, stunting dan pemulihan ekonomi;
5. Belanja untuk kepentingan publik, kepentingan yang luas dan strategis.

Alokasi anggaran dalam PPAS berdasarkan prioritas daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prioritas Daerah 1 : MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN HILIRISASI KOMODITAS UNGGULAN UNTUK MENGAKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI						

			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
				Jumlah koperasi aktif			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	453.703.800,00	
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				
				Jumlah Koperasi sehat			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	300.000.000,00	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
				Jumlah koperasi yang menjalin kerjasama dengan badan usaha lainnya			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	350.000.000,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
				Jumlah koperasi yang mampu berdaya saing			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	450.000.000,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
				Jumlah UMK yang berdaya saing			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	892.199.600,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
				Jumlah Usaha Mikro menjadi usaha kecil			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.368.179.850,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
				Nilai Kinerja PTSP dan Percepatan Pelayanan Berusaha Pemerintah Daerah			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	239.488.000,00	

					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	273.817.500,00	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
				Minat Investasi			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	624.739.000,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
				Nilai Realisasi investasi PMA			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	420.000.000,00	
				Nilai Realisasi investasi PMDN			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	420.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
				Produksi Perikanan Tangkap			
					Dinas Perikanan	2.837.260.350,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
				Produksi Perikanan Budidaya			
					Dinas Perikanan	2.278.464.756,00	
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
				Tingkat Partisipasi Pokmaswas			
					Dinas Perikanan	1.248.411.957,00	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
				Konsumsi Ikan			
					Dinas Perikanan	1.730.000.150,00	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan			
					Dinas Perkebunan	3.601.036.025,00	
				Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan			
					Dinas Perkebunan	2.611.455.300,00	

					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	11.008.809.793,00	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
				Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan			
					Dinas Perkebunan	200.049.000,00	
				Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan			
					Dinas Perkebunan	200.049.000,00	
				Persentase ketersediaan prasarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan)			
					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	2.698.454.045,00	

					Dinas Perkebunan	7.765.706.776,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				

					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1.621.167.700,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Bencana Perkebunan			
					Dinas Perkebunan	14.835.733.609,00	
				Persentase serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang di tangani			
					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	355.110.000,00	
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Pelaku Usaha Perkebunan Mendapatkan Kejelasan Status Usahanya			
					Dinas Perkebunan	385.839.000,00	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
				Persentase Penggunaan Teknologi yang diterapkan oleh petani			
					Dinas Perkebunan	3.570.703.696,00	
				Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani			
					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.999.994.569,00	
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
				Persentase Rekomendasi Perizinan Pelaku usaha yang terbit			
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	622.268.378,00	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
				Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi Baik			
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	4.124.214.850,00	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
				Persentase ketersediaan kebutuhan barang pokok dan penting terhadap kebutuhan			
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.401.810.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
				Persentase peningkatan volume penjualan produk			
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	4.833.217.000,00	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
				Persentase UTP Bertanda Tera Sah			
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	372.898.040,00	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
				Jumlah Kemitraan Usaha			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	131.511.050,00	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
				persentase peningkatan tenaga kerja industri kecil menengah			
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.003.180.057,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				
				Persentase izin Usaha Industri yang Terkendali			
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	59.749.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
				Jumlah Usaha Industri yang terdaftar di SIINas			
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	235.629.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Dilaksanakan Tepat Waktu dan Akuntabel			
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8.144.103.874,00	
				Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	766.733.200,00	
				Persentase pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	125.024.000,00	
				Persentase pemenuhan layanan administrasi			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	760.984.000,00	
				Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.236.669.192,00	
				Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran			
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	759.833.180,00	
				Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	196.337.400,00	
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.636.136.197,00	
				Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang Dilaksanakan Tepat Waktu			
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.143.450.477,00	
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	601.608.934,00	
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.328.571.813,00	
					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	85.000.000,00	

					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.352.480.321,00	
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	47.417.000,00	
2	Prioritas Daerah 2 : MENINGKATKAN PENDAPATAN DAN MENGURANGI BEBAN MASYARAKAT UNTUK MENURUNKAN KEMISKINAN						

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				Angka kematian bayi			
					Dinas Kesehatan	2.500.000.000,00	
				Angka kematian ibu			
					Dinas Kesehatan	2.500.000.000,00	
				Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jaringan			
					Dinas Kesehatan	2.500.000.000,00	
				Jumlah FKRTL Akreditasi Paripurna			
					Dinas Kesehatan	2.500.000.000,00	
				Jumlah FKTP Akreditasi Minimal Utama			
					Dinas Kesehatan	2.500.000.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas			
					Dinas Kesehatan	2.500.000.000,00	
				Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			
					Dinas Kesehatan	2.500.000.000,00	
				Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			
					Dinas Kesehatan	2.500.000.000,00	
				Jumlah Pelayanan Standard Minimal Kesehatan			
					Dinas Kesehatan	2.500.000.000,00	
				Persentase Alat Kesehatan Memenuhi Syarat			
					Dinas Kesehatan	2.500.000.000,00	
				Persentase Alat Kesehatan yang di lakukan pemeliharaan atau kalibrasi			
					Dinas Kesehatan	2.500.000.000,00	
				Persentase ketersediaan BMHP			
					Dinas Kesehatan	2.500.000.000,00	
				Persentase ketersediaan obat esensial			
					Dinas Kesehatan	2.500.000.000,00	
				Prevalensi stunting pada balita			
					Dinas Kesehatan	2.500.000.000,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
				Persentase PMKS yang mendapat Layanan			
					Dinas Sosial	13.443.391.370,00	

					Dinas Sosial	11.222.000,00	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

					Dinas Sosial	2.115.216.700,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
				Persentase Masyarakat Kurang Mampu (DTKS) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga			
					Dinas Sosial	47.387.063.521,00	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
				Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten			
					Dinas Sosial	1.177.715.000,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
				Jumlah peta persebaran penggunaan alat kontrasepsi			
					Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	66.469.867,00	
				Persentase Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)			
					Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	66.469.867,00	
				Persentase stakeholder yang memahami kajian dampak kependudukan.			
					Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	66.469.867,00	

					Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	99.338.000,00	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
					Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.598.951.001,00	
				Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi			
					Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.598.951.001,00	
				Persentase Kebutuhan KB Yang Tidak Terpenuhi			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.598.951.001,00	
				Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE)			
					Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.598.951.001,00	
				Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)			
					Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.598.951.001,00	
				Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB			
					Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.598.951.001,00	
				Persentase Penggerakan dan Wawasan Masyarakat Tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana			
					Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.598.951.001,00	

					Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	317.449.000,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
				Cakupan Peran Serta Organisasi dan Masyarakat Yang di Bina			
					Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	491.655.320,00	
				Persentase Jumlah Kelompok PIK-R, BKR, BKB, BKL dan UPPKS Yang Dibina			
					Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	983.310.640,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				PERSENTASE DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG TERLAYANI			
					Dinas Sosial	9.084.529.296,00	
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran			
					Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	38.713.950,00	

					Dinas Kesehatan	28.750.000.000,00	
3	Prioritas Daerah 3 : MENINGKATKAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR DASAR UNTUK Mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar						

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
				Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.897.010.000,00	
				Persentase Jaringan Irigasi, Sungai dan Penampung Air lainnya dalam Kondisi Baik			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	750.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
				Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Air Bersih (Peripaan dan Non Perpipaian)			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.795.004.600,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
				Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi yang layak (WC Individual, Komunal)			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9.637.066.912,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
				Persentase Drainase dalam Kondisi Baik			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	18.338.765.186,00	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
				Persentase penataan bangunan rumah dan gedung negara kabupaten yang ditangani			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	88.251.252.238,00	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
				Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertangani			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.987.632.400,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
				Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	310.830.982.731,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
				[deleted]			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.050.000.000,00	
				Persentase Tenaga Jasa Konstruksi yang terlatih dan bersertifikat			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.050.000.000,00	

					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50.000.000,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
				Persentase Ketaatan dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.890.000.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
				Persentase Rumah Korban bencana / Relokasi Yang di Bangun / Di rehab			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.835.133.450,00	

					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	50.000.000,00	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
				Persentase Rumah di Luar Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19.710.000.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
				Persentase PSU Yang dibangun / direhab			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	50.683.086.756,00	
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				
				Persentase Tanah yang dibebaskan/ diganti rugi oleh PEMDA			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	20.000.000.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dicapai			
					Dinas Lingkungan Hidup	345.360.000,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
				Persentase lampu jalan dalam kondisi baik			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.520.000.000,00	
				Persentase sarana prasarana jalan dalam kondisi baik			
					Dinas Perhubungan	2.826.349.269,00	

					Dinas Perhubungan	1.305.695.223,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
				Persentase Sarana Prasarana pelayaran dalam kondisi baik			
					Dinas Perhubungan	2.700.177.050,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN				
				Persentase Sarana Prasarana transportasi udara dalam kondisi baik			
					Dinas Perhubungan	88.860.000,00	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
				Persentase ketersediaan kebutuhan barang pokok dan penting terhadap kebutuhan			
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	49.402.000,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
				Persentase Fasilitas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
					Kecamatan Lais	4.950.000,00	
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lais)			
					Kecamatan Lais	4.950.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.934.106.269,00	
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	56.973.840,00	
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	170.000.000,00	
				Persentase pemenuhan Layanan Administrasi			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24.968.340,00	
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	890.000.000,00	
				Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	32.005.500,00	
				Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.527.630.015,00	
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	92.295.000,00	
				Persentase Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.128.326.948,00	

					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.441.389.256,00	
4	Prioritas Daerah 4 : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA						

			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
				Persentase Capaian Penanggulangan Bencana (100%)			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.899.997.071,00	
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase Penyelesaian Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup			
					Dinas Lingkungan Hidup	800.000.000,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dicapai			
					Dinas Lingkungan Hidup	1.205.055.924,00	

					Dinas Lingkungan Hidup	32.048.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				

					Dinas Lingkungan Hidup	3.932.000.000,00	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin Lingkungan dan izin PPLH			
					Dinas Lingkungan Hidup	253.735.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				

					Dinas Lingkungan Hidup	99.937.000,00	
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				

					Dinas Lingkungan Hidup	171.952.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
				Persentase Penanganan sampah			
					Dinas Lingkungan Hidup	10.223.741.437,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.687.826.964,00	
				Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Bidang Lingkungan Hidup			
					Dinas Lingkungan Hidup	129.988.000,00	
				Terlaksananya penunjang urusan Bidang Lingkungan Hidup			
					Dinas Lingkungan Hidup	10.904.038.131,00	
				Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Lingkungan Hidup			
					Dinas Lingkungan Hidup	19.077.077.163,00	

					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	278.248.340,00	
					Dinas Lingkungan Hidup	519.510.950,00	
5	Prioritas Daerah 5 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA						

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
				Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.268.358.100,00	
				Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.737.421.900,00	
				Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	54.742.093.500,00	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	34.008.115.800,00	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	55.211.157.300,00	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	469.063.800,00	
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.926.726.231,00	
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.002.335.800,00	
				Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29.739.757.700,00	
				Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29.739.757.700,00	
				Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	59.479.515.400,00	
				Persentase sekolah yang sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM)			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29.739.757.700,00	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				Angka kematian bayi			
					Dinas Kesehatan	66.930.261.870,00	
				Angka kematian ibu			
					Dinas Kesehatan	66.930.261.870,00	
				Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jaringan			
					Dinas Kesehatan	66.930.261.870,00	
				Jumlah FKRTL Akreditasi Paripurna			
					Dinas Kesehatan	2.970.009.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah FKTP Akreditasi Minimal Utama			
					Dinas Kesehatan	66.930.261.870,00	
				Jumlah Operasional Pelayanan Rumah Sakit			
					Dinas Kesehatan	63.960.252.870,00	
				Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas			
					Dinas Kesehatan	66.930.261.870,00	
				Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			
					Dinas Kesehatan	66.930.261.870,00	
				Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			
					Dinas Kesehatan	66.930.261.870,00	
				Jumlah Pelayanan Standard Minimal Kesehatan			
					Dinas Kesehatan	66.930.261.870,00	
				Persentase Alat Kesehatan Memenuhi Syarat			
					Dinas Kesehatan	66.460.252.870,00	
				Persentase Alat Kesehatan yang di lakukan pemeliharaan atau kalibrasi			
					Dinas Kesehatan	50.974.443.620,00	
				Persentase Jaminan Kesehatan Masyarakat			
					Dinas Kesehatan	470.009.000,00	
				Persentase ketersediaan BMHP			
					Dinas Kesehatan	66.930.261.870,00	
				Persentase ketersediaan obat esensial			
					Dinas Kesehatan	66.930.261.870,00	
				Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau berpotensi bencana			
					Dinas Kesehatan	470.009.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana (FKTP dan FKTR)			
					Dinas Kesehatan	15.485.809.250,00	
				Prevalensi stunting pada balita			
					Dinas Kesehatan	66.930.261.870,00	

					Dinas Kesehatan	155.968.000,00	
					Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	9.999.999.929,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
				Persentase Puskesmas dengan jenis Nakes sesuai Standar			
					Dinas Kesehatan	917.594.700,00	
				Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya			
					Dinas Kesehatan	917.594.700,00	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
				Persentase sertifikasi tempat pengelolaan makanan dan minuman			
					Dinas Kesehatan	33.200.000,00	

					Dinas Kesehatan	163.037.000,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
				Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas			
					Dinas Kesehatan	177.926.980,00	
				Persentase desa yang melaksanakan PHBS			
					Dinas Kesehatan	86.014.980,00	
				Persentase PHBS tempat kerja			
					Dinas Kesehatan	86.014.980,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Rumah Sehat			
					Dinas Kesehatan	86.014.980,00	

					Dinas Kesehatan	87.928.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan Keindahan) di Kabupaten			
					Satuan Polisi Pamong Praja	588.393.000,00	
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				
				Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah			
					Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	418.587.050,00	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja			
					Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	4.524.818.600,00	

					Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	119.962.000,00	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
				Persentase Pekerja yang ditempatkan			
					Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	978.035.525,00	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
				Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun			
					Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	743.103.000,00	
				Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan			
					Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	743.103.000,00	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	934.046.550,00	
				Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Menerapkan PUG melalui PPRG			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	934.046.550,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	209.710.000,00	
				Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	272.961.246,00	
				Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	63.251.246,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				

					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	156.533.000,00	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
				Jumlah Penghargaan Nasional Kabupaten Layak Anak (KLA)			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	492.805.500,00	
				penguatan dan pengembangan lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	492.805.500,00	
				Persentase Kecamatan Layak Anak			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	492.805.500,00	
				Persentase Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah non pemerintah dan Dunia Usaha			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	248.500.000,00	
				Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	244.305.500,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	846.406.500,00	
				Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap anak dan dampingan korban bagi anak memerlukan perlindungan khusus			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	846.406.500,00	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
				Tingkat Konsumsi Energi PerKapita/Hari			
					Dinas Ketahanan Pangan	3.741.363.738,00	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
				Persentase Desa Rawan Pangan (Prioritas 1,2,3)			
					Dinas Ketahanan Pangan	81.902.388,00	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
				Persentase Pangan Segar Aman Dikonsumsi			
					Dinas Ketahanan Pangan	297.100.919,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
				Persentase pemuda yang bebas narkoba			
					Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	614.690.000,00	
				Persentase pemuda yang berwirausaha terhadap pemuda yang dibina			
					Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	1.678.028.500,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
				Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga			
					Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	80.807.820.111,00	
				Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	51.812.035.449,00	
				Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk.			
					Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	27.378.966.823,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
				Persentase Organisasi Kepramukaan yang terakreditasi			
					Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	3.435.154.990,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
				Pembinaan Sanggar/Komunitas Seni Budaya			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	326.408.000,00	
				Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	326.408.000,00	
				Penyelenggaraan festival seni dan budaya			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	326.408.000,00	
				Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	326.408.000,00	

					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.201.841.850,00	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
				Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	275.000.000,00	
				Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	275.000.000,00	
				Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	275.000.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
				Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	299.995.000,00	
				Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	299.995.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				
				Jumlah kegiatan yang di laksanakan dan jumlah koleksi			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	345.716.000,00	
				Jumlah Koleksi			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	345.716.000,00	
				Jumlah Kunjungan			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	345.716.000,00	
				Penyelenggaraan Kegiatan yang di laksanakan di Museum			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	345.716.000,00	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
				Meningkatnya budaya gemar membaca Tingkat Daerah			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	156.021.032,00	
				Meningkatnya budaya gemar membaca Tingkat Daerah [deleted]			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	737.445.142,00	
				Terbinanya Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	893.466.174,00	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
				Jumlah objek wisata			
					Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	1.319.020.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
				Jumlah kunjungan wisatawan			
					Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	1.729.791.600,00	
				Jumlah pelaku usaha pariwisata			
					Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	1.729.791.600,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
				Jumlah pelaku usaha pariwisata			
					Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	328.039.250,00	
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				

					Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	300.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
				Persentase pengelolaan bantuan keuangan sektor pendidikan			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.105.969.000,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
				Persentase Fasilitas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
					Kecamatan Lais	470.987.000,00	
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lais)			
					Kecamatan Lais	470.987.000,00	

					Kecamatan Lais	22.187.805,00	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Lais			
					Kecamatan Lais	45.300.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
				Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lais)			
					Kecamatan Lais	34.470.000,00	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
				Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Lais			
					Kecamatan Lais	95.400.000,00	
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
				Persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.049.958.635,00	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
				Tersedianya dokumen laporan analisa stabilitas politik			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.321.187.372,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
				Persentase Organisasi Masyarakat yang dibina			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	150.062.000,00	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
				Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	399.937.890,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
				Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	700.000.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					Dinas Kesehatan	282.735.216.282,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	612.557.028.307,00	
				Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL			
					Dinas Kesehatan	15.506.554.800,00	
				Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL			
					Dinas Kesehatan	1.821.514.000,00	
				Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL			
					Dinas Kesehatan	307.398.966.982,00	
				Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP			
					Dinas Kesehatan	320.652.840.282,00	
				Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP			
					Dinas Kesehatan	4.604.648.500,00	
				Peningkatan Pelayanan BLUD			
					Dinas Kesehatan	3.734.530.000,00	
				Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
					Kecamatan Lais	4.085.866.148,00	
				Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu			
					Dinas Kesehatan	17.765.853.800,00	
				Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.905.894.600,00	
					Kecamatan Lais	4.085.866.148,00	
				Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dilaksanakan dengan tepat			
					Dinas Kesehatan	244.747.160.773,00	
				Persentase pemenuhan Layanan Administrasi			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	441.382.700,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran			
					Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	199.176.210,00	
				Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu			
					Dinas Kesehatan	3.341.180.100,00	
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	609.209.751.007,00	
				Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor			
					Dinas Kesehatan	2.193.026.500,00	
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			
					Dinas Kesehatan	58.954.220.609,00	
				undefined			
					Dinas Kesehatan	3.826.321.000,00	

					Dinas Kesehatan	17.445.129.000,00	
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	543.432.000,00	
					Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	140.000.000.000,00	
6	Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						

			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan Keindahan) di Kabupaten			
					Satuan Polisi Pamong Praja	1.896.057.710,00	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
				Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota			
					Satuan Polisi Pamong Praja	603.825.040,00	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tingkat waktu tanggap (Response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)			
					Satuan Polisi Pamong Praja	4.998.389.000,00	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				

					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	719.678.919,00	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				

					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	423.029.402,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
				Persentase capaian terlaksananya Informasi Administrasi Kependudukan yang mudah diakses oleh masyarakat			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.815.154.151,00	

					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.398.378.372,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
				Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	108.176.708,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				
				Jumlah Desa yang melakukan kerjasama			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	138.223.000,00	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
				Persentase Desa Tertib Administrasi			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.083.060.286,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
				Jumlah Keluarga Inklusif yang dibina			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.556.272.774,00	
				Jumlah Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat yang dibina			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.556.272.774,00	
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang dibina			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.556.272.774,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
				Persentase sarana prasarana jalan dalam kondisi baik			
					Dinas Perhubungan	45.116.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
				Persentase informasi pemerintahan yang disampaikan kepada publik			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	8.890.472.742,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
				Persentase aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	7.063.709.082,00	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
				Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.633.167.050,00	
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dibidang Pelayanan Perizinan			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.633.167.050,00	
				Persentase Penerbitan Izin dan non perizinan Sesuai SOP			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.633.167.050,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
				Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	239.208.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				

					Dinas Komunikasi dan Informatika	1.263.217.775,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
				Persentase keamanan informasi Pemerintah Daerah			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	1.282.600.401,00	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
				Meningkatnya budaya gemar membaca Tingkat Daerah			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	625.573.888,00	
				Meningkatnya budaya gemar membaca Tingkat Daerah [deleted]			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	994.626.216,00	
				Terbinanya Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	1.620.200.104,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
				Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	756.207.578,00	
				Terkelolahnya Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	756.207.578,00	
				Terkelolahnya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	756.207.578,00	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				Jumlah Batas Wilayah Daerah yang jelas dan terselesaikan			
					Sekretariat Daerah	18.437.106.817,00	
				Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Sekretariat Daerah	18.437.106.817,00	
				Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan Hukum			
					Sekretariat Daerah	18.437.106.817,00	
				Jumlah pasangan Isbat Nikah warga Kab. Musi banyuasin yang kurang mampu			
					Sekretariat Daerah	18.437.106.817,00	
				Jumlah peserta STQ dan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi			
					Sekretariat Daerah	18.437.106.817,00	
				Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun			
					Sekretariat Daerah	18.437.106.817,00	
				Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten			
					Sekretariat Daerah	21.051.766.173,00	
				Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)			
					Sekretariat Daerah	18.437.106.817,00	
				Terbinanya Sarjana Bina Desa			
					Sekretariat Daerah	18.437.106.817,00	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
				Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			
					Sekretariat Daerah	2.268.851.450,00	
				Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan			
					Sekretariat Daerah	2.916.564.450,00	
				Jumlah pemetaan potensi sumber daya alam			
					Sekretariat Daerah	2.916.564.450,00	
				Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik			
					Sekretariat Daerah	2.268.851.450,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah rekomendasi izin pertambangan			
					Sekretariat Daerah	2.899.463.450,00	
				Laporan Inflasi secara periode			
					Sekretariat Daerah	2.268.851.450,00	
				Standar Satuan Harga (SSH)			
					Sekretariat Daerah	2.268.851.450,00	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
				Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD			
					Sekretariat DPRD	38.736.777.649,00	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
				Persentase keselarasan program RKPD dalam RPJMD			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.029.387.642,00	
				Presentase keselarasan program kabupaten dengan program nasional			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	612.042.750,00	
				Rasio ketersediaan data untuk untuk perencanaan pembangunan			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	612.042.750,00	

					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	160.762.139,00	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
				Persentase program/kegiatan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.498.428.750,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
				Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)			
					Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1.162.500.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Pencairan Dana On Schedul			
					Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	500.024.083.028,00	
				Persentase SKPD Yang Penganggarannya Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)			
					Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1.000.000.000,00	

					Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	424.544.780,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
				Persentase Data Aset Yang Akurat			
					Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	2.171.453.529,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
				Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
					Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	5.795.600.000,00	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
				Persentase Capaian Kernerja ASN yang Memiliki Capaian Kinerja baik			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.689.997.850,00	
				Persentase Capaian Kernerja ASN yang Memiliki Capaian Kinerja Baik			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	574.302.700,00	
				Persentase JPT yang mempunyai Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	6.264.300.550,00	
				Persentase Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	6.264.300.550,00	
				Persentase Penempatan ASN sesuai dengan Standar Jabatan			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	6.264.300.550,00	
				Survey Kepuasan ASN			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	7.294.300.550,00	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
				Persentase Hasil Inovasi yang diimplementasikan			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	542.281.197,00	
				Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti [deleted]			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	273.378.346,00	
				Presentasi hasil inovasi yang diimplementasikan			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	159.929.981,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
				Opini terhadap laporan keuangan pemda			
					Inspektorat	3.599.999.200,00	
				Persentase PD yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB			
					Inspektorat	3.599.999.200,00	
				Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat			
					Inspektorat	3.599.999.200,00	
				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti			
					Inspektorat	3.599.999.200,00	
				Persentase Unit Pelayanan Publik Kategori Baik			
					Inspektorat	3.599.999.200,00	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
				Level Kapabilitas APIP			
					Inspektorat	1.500.000.800,00	
				Nilai Maturitas SPIP			
					Inspektorat	1.500.000.800,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Nilai Reformasi Birokrasi PEMDA			
					Inspektorat	1.500.000.800,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan			
					Kecamatan Sanga Desa	789.320.831,00	
				Persentase penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
					Kecamatan Batanghari Leko	528.384.000,00	
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Babat Supat)			
					Kecamatan Babat Supat	492.852.000,00	
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Bayung Lencir)			
					Kecamatan Bayung Lencir	528.529.600,00	
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Jirak Jaya)			
					Kecamatan Jirak Jaya	502.385.000,00	
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Keluang)			
					Kecamatan Keluang	535.019.000,00	
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lalan)			
					Kecamatan Lalan	760.380.000,00	
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lawang Wetan)			
					Kecamatan Lawang Wetan	4.950.000,00	
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lawang Wetan) [deleted]			
					Kecamatan Lawang Wetan	471.700.000,00	
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi)			
					Kecamatan Plakat Tinggi	540.125.000,00	
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sekayu)			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Sekayu	660.083.783,00	
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Keruh)			
					Kecamatan Sungai Keruh	491.910.000,00	
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Lilin)			
					Kecamatan Sungai Lilin	537.584.000,00	
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Tungkal Jaya)			
					Kecamatan Tungkal Jaya	452.611.000,00	
				Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan (Kelurahan Sungai Lilin dan Kelurahan Sungai Lilin Jaya)			
					Kecamatan Sungai Lilin	5.000.000,00	
				Persentase penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan			
					Kecamatan Lalan	28.700.000,00	
				Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan			
					Kecamatan Sekayu	150.000.000,00	

					Kecamatan Babat Supat	38.049.200,00	
					Kecamatan Babat Toman	822.973.678,00	
					Kecamatan Batanghari Leko	5.000.000,00	
					Kecamatan Bayung Lencir	304.973.721,00	
					Kecamatan Jirak Jaya	5.000.000,00	
					Kecamatan Keluang	149.929.259,00	
					Kecamatan Lawang Wetan	40.860.000,00	
					Kecamatan Sanga Desa	4.900.000,00	
					Kecamatan Sekayu	449.999.999,00	
					Kecamatan Sungai Keruh	5.400.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Sungai Lilin	307.176.000,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
					Kecamatan Lawang Wetan	0,00	
					Kecamatan Plakat Tinggi	0,00	
				Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa			
					Kecamatan Jirak Jaya	0,00	
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kec. Lalan)			
					Kecamatan Lalan	0,00	
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat (Kec. Batanghari Leko)			
					Kecamatan Batanghari Leko	0,00	
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			
					Kecamatan Sanga Desa	698.856.278,00	
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Sanga Desa			
					Kecamatan Sanga Desa	699.131.605,00	
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Sekayu			
					Kecamatan Sekayu	0,00	
				Persentasi Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Plakat Tinggi			
					Kecamatan Plakat Tinggi	0,00	
				Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
					Kecamatan Sekayu	0,00	

					Kecamatan Babat Toman	1.399.997.945,00	
					Kecamatan Bayung Lencir	1.398.958.747,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Keluang	700.070.616,00	
					Kecamatan Sanga Desa	0,00	
					Kecamatan Sekayu	2.799.999.886,00	
					Kecamatan Sungai Lilin	1.400.000.000,00	
					Kecamatan Tungkal Jaya	0,00	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kecamatan Babat Supat			
					Kecamatan Babat Supat	13.760.000,00	
				persentase penegakan peraturan daerah kecamatan bayung lencir			
					Kecamatan Bayung Lencir	9.000.000,00	
				Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Kec. Batanghari Leko)			
					Kecamatan Batanghari Leko	14.412.000,00	
				Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Jirak			
					Kecamatan Jirak Jaya	30.480.000,00	
				Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Keluang			
					Kecamatan Keluang	10.650.000,00	
				Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. lawang Wetan			
					Kecamatan Lawang Wetan	16.800.000,00	
				Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Plakat Tinggi			
					Kecamatan Plakat Tinggi	10.000.000,00	
				Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Sanga Desa			
					Kecamatan Sanga Desa	18.300.000,00	
				Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Sungai Keruh			
					Kecamatan Sungai Keruh	21.650.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Sungai Lilin			
					Kecamatan Sungai Lilin	5.040.000,00	
				Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Tungkal Jaya			
					Kecamatan Tungkal Jaya	23.820.000,00	
				Terselenggaranya Penegakan Peraturan Daerah			
					Kecamatan Sekayu	24.929.730,00	

					Kecamatan Babat Toman	12.780.000,00	
					Kecamatan Lalan	13.050.000,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
				Persentase Penyelesaian Konflik di wilayah kecamatan			
					Kecamatan Tungkal Jaya	23.820.000,00	
				Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan			
					Kecamatan Sanga Desa	25.005.000,00	
				Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Babat Supat)			
					Kecamatan Babat Supat	7.747.000,00	
				Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Batanghari Leko)			
					Kecamatan Batanghari Leko	11.712.000,00	
				Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Bayung Lencir)			
					Kecamatan Bayung Lencir	11.740.000,00	
				Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Jirak Jaya)			
					Kecamatan Jirak Jaya	13.815.000,00	
				Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Keluang)			
					Kecamatan Keluang	14.015.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lalan)			
					Kecamatan Lalan	9.290.000,00	
				Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lawang Wetan)			
					Kecamatan Lawang Wetan	16.800.000,00	
				Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi)			
					Kecamatan Plakat Tinggi	30.000.000,00	
				Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Sungai Keruh)			
					Kecamatan Sungai Keruh	20.006.000,00	
				Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Sungai Lilin)			
					Kecamatan Sungai Lilin	5.040.000,00	
				Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Tungkal Jaya)			
					Kecamatan Tungkal Jaya	23.820.000,00	

					Kecamatan Babat Toman	14.300.000,00	
					Kecamatan Sekayu	40.000.000,00	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
				Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Babat Supat			
					Kecamatan Babat Supat	55.040.000,00	
				Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Batanghari Leko			
					Kecamatan Batanghari Leko	20.492.000,00	
				Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Bayung Lencir			
					Kecamatan Bayung Lencir	25.965.000,00	
				Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Jirak Jaya			
					Kecamatan Jirak Jaya	28.320.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Keluang			
					Kecamatan Keluang	20.300.000,00	
				Persentase Jumlah Desa yang dibina (Kec. Lalan)			
					Kecamatan Lalan	18.580.000,00	
				Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Lawang Wetan			
					Kecamatan Lawang Wetan	27.540.000,00	
				Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Plakat Tinggi			
					Kecamatan Plakat Tinggi	60.000.000,00	
				Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sanga Desa			
					Kecamatan Sanga Desa	39.128.499,00	
				Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sekayu			
					Kecamatan Sekayu	99.960.000,00	
				Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sungai Keruh			
					Kecamatan Sungai Keruh	40.586.000,00	
				Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sungai Lilin			
					Kecamatan Sungai Lilin	20.160.000,00	
				Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Tungkal Jaya			
					Kecamatan Tungkal Jaya	159.498.000,00	

					Kecamatan Babat Toman	22.950.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	135.000.000,00	
					Dinas Komunikasi dan Informatika	9.041.448.619,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.293.580.928,00	
					Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	34.219.080,00	
					Kecamatan Batanghari Leko	3.258.838.954,00	
					Kecamatan Bayung Lencir	2.942.673.918,00	
					Kecamatan Sekayu	936.844.378,00	
					Kecamatan Sungai Lilin	4.405.966.885,00	
				[deleted]			
					Dinas Perkebunan	8.539.501.930,00	
				Indeks Tata Kelola Pemerintahan			
					Kecamatan Lawang Wetan	603.811.071,00	
				Jumlah Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	135.000.000,00	
				Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
					Sekretariat Daerah	73.840.740.731,00	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang tepat dan cepat			
					Sekretariat Daerah	69.605.250.939,00	
				Meningkatnya Jumlah sarana dan prasarana fasilitas kerja (Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas)			
					Sekretariat Daerah	69.605.250.939,00	
				Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten dan Indeks Reformasi Birokrasi			
					Sekretariat Daerah	69.605.250.939,00	
				persentase kualitas pelayanan masyarakat			
					Kecamatan Bayung Lencir	94.674.000,00	
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Dilaksanakan Sangat Tepat			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.823.799.983,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel			
					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	20.178.442.418,00	
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel			
					Sekretariat DPRD	45.277.706.340,00	
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Dilaksanakan Tepat Waktu dan Akuntabel			
					Dinas Ketahanan Pangan	625.829.520,00	
				Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksankan tepat waktu dan Akuntabel			
					Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	85.000.033,00	
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilakukan sangat tepat			
					Satuan Polisi Pamong Praja	21.315.643.436,00	
				Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.885.494.431,00	
				Persentase Layanan Adminitrasi dan Perkantoran			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	163.382.500,00	
				Persentase layanan dan perkantoran			
					Kecamatan Jirak Jaya	394.704.498,00	
				Persentase Layanan dan Perkantoran			
					Kecamatan Babat Supat	939.012.526,00	
					Kecamatan Keluang	3.479.338.456,00	
				Persentase Layanan Keuangan, Administrasi dan Kesejahteraan DPRD			
					Sekretariat DPRD	59.855.197.668,00	
				Persentase Layanan Umum Perangkat Daerah			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.021.826.000,00	
				Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan, Persentase pemenuhan layanan administrasi, Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Lalan	2.933.541.619,00	
				persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan, persentase pemenuhan layanan administrasi, persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu persentase saran dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			
					Kecamatan Bayung Lencir	2.847.999.918,00	
				Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	532.004.564,00	
					Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	10.928.671.751,00	
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	274.469.510,00	
					Kecamatan Plakat Tinggi	601.123.960,00	
					Kecamatan Sanga Desa	3.463.094.014,00	
					Kecamatan Sekayu	936.844.378,00	
					Kecamatan Tungkal Jaya	3.788.606.202,00	
				Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan sangat tepat			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	524.510.000,00	
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	496.325.500,00	
				Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan Sangat Tepat			
					Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	6.303.592.605,00	
				Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat, Persentase pemenuhan layanan administrasi, Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			
					Kecamatan Batanghari Leko	2.841.889.121,00	
				Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat, Persentase pemenuhan layanan administrasi, Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam keadaan baik			
					Kecamatan Sungai Keruh	2.540.587.537,00	
				Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat, Persentase pemenuhan layanan administrasi, Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Jirak Jaya	339.896.383,00	
					Kecamatan Lalan	161.733.000,00	
				Persentase Pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat Persentase pemenuhan layanan administrasi Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			
					Kecamatan Tungal Jaya	271.830.400,00	
				Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan Dilaksanakan Sangat Tepat Waktu			
					Kecamatan Sungai Lilin	411.982.064,00	
				Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu			
					Inspektorat	454.438.000,00	
				Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan Tepat Waktu dan Akuntabel			
					Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.381.724.711,00	
				Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Sangat Tepat			
					Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	729.539.901,00	
				Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Sangat Tepat			
					Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	149.519.000,00	
				Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu dan Akuntabel			
					Dinas Perikanan	114.282.236,00	
				Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Dilaksanakan Tepat Waktu dan Akuntabel			
					Dinas Perkebunan	1.370.430.667,00	
				Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.985.404.269,00	
				Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepada Daerah dan Sekretaris Daerah			
					Sekretariat Daerah	27.261.587.611,00	
				Persentase pemenuhan layanan administrasi			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	120.000.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Inspektorat	867.923.600,00	
				Persentase pemenuhan layanan administrasi			
					Kecamatan Keluang	482.130.667,00	
				Persentase pemenuhan Layanan Administrasi			
					Kecamatan Plakat Tinggi	301.822.158,00	
					Kecamatan Sanga Desa	490.476.002,00	
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	910.681.700,00	
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
					Sekretariat Daerah	60.924.843.728,00	
				Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran			
					Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	134.505.000,00	
					Sekretariat Daerah	20.753.460.325,00	
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	303.900.000,00	
					Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	969.776.014,00	
					Sekretariat DPRD	2.045.455.178,00	
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran			
					Kecamatan Batanghari Leko	416.949.833,00	
					Kecamatan Jirak Jaya	1.335.325.144,00	
				Persentase pemenuhan layanan Keuangan dan administrasi perkantoran			
					Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	2.494.302.092,00	
				Persentase Pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran			
					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.355.459.617,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran			
					Dinas Ketahanan Pangan	861.540.853,00	
				Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran			
					Dinas Perikanan	6.575.239.703,00	
					Kecamatan Sekayu	7.361.482.902,00	
					Kecamatan Sungai Keruh	589.192.349,00	
					Kecamatan Sungai Lilin	4.000.648.332,00	
				Persentase Pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	7.886.938.593,00	
				Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	432.270.000,00	
				Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu			
					Sekretariat Daerah	21.590.203.003,00	
				Persentase Pengelolaan Kepegawaian dilaksanakan tepat waktu			
					Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	23.020.140.985,00	
				Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu			
					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	46.076.100,00	
					Inspektorat	17.504.890.857,00	
					Kecamatan Plakat Tinggi	49.850.780,00	
				Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	155.376.200,00	
				Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan Tepat Waktu			
					Dinas Perkebunan	6.330.685.633,00	
				Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang Dilaksanakan Tepat Waktu			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Ketahanan Pangan	621.264.556,00	
				Persentase Pengelolaan Kepegawaian Yang Dilaksanakan Tepat Waktu			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100.616.630,00	
					Dinas Perikanan	135.795.000,00	
				Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu			
					Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	220.836.000,00	
				Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	134.666.000,00	
				Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan Tepat Waktu			
					Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	298.817.000,00	
				Persentase Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani (NTP-R)			
					Dinas Perkebunan	147.936.000,00	
				Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
					Kecamatan Babat Toman	34.999.881,00	
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lawang Wetan)			
					Kecamatan Lawang Wetan	379.215.569,00	
				Persentase Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi)			
					Kecamatan Plakat Tinggi	1.919.204.525,00	
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			
					Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	3.537.397.038,00	
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	676.837.364,00	
					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	226.529.725,00	
					Inspektorat	1.693.848.133,00	
					Kecamatan Sanga Desa	700.898.800,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	938.785.127,00	
					Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.250.000.000,00	
					Sekretariat DPRD	12.532.036.150,00	
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	70.005.132,00	
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.605.771.843,00	
					Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	122.299.000,00	
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.210.230.482,00	
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik			
					Dinas Ketahanan Pangan	5.068.551.531,00	
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik			
					Dinas Perikanan	1.575.471.522,00	
				Persentase terlaksananya urusan penunjang pemerintah daerah			
					Dinas Perhubungan	11.912.709.637,00	
				Persentase Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	9.041.448.619,00	
				Persentase terlayannya Kunjungan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			
					Sekretariat Daerah	69.605.250.939,00	
				Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	635.000.000,00	
				Persentase Tersusunnya Analisa Jabatan Perangkat Daerah dalam Kab. Muba			
					Sekretariat Daerah	8.680.407.211,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	212.546.000,00	
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	747.803.222,00	
				Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel, Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran, Persentase Pengelolaan Kepegawaian dilaksanakan tepat waktu, Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik			
					Dinas Perkebunan	466.632.800,00	
				Terbentuknya inovasi pelayanan publik perangkat daerah dan tersertifikasinya pelayanan publik perangkat daerah dengan standar ISO			
					Sekretariat Daerah	69.605.250.939,00	
				Terpeliharanya jumlah aset tetap/aset tak berwujud milik daerah			
					Sekretariat Daerah	69.605.250.939,00	

					Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	8.901.765.152,00	
					Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	11.779.470.311,00	
					Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	120.000.000,00	
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.189.615.941,00	
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.230.378.873,00	
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.485.038.425,00	
					Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	1.580.910.420,00	
					Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	12.118.464.920,00	
					Dinas Perkebunan	801.831.468,00	
					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	974.763.247,00	
					Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	17.590.000,00	
					Kecamatan Babat Supat	2.029.778.962,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Babat Toman	4.503.806.751,00	
					Kecamatan Bayung Lencir	968.479.756,00	
					Kecamatan Lalan	239.388.034,00	
					Kecamatan Lawang Wetan	2.857.092.072,00	
					Kecamatan Sekayu	601.169.046,00	
					Kecamatan Sungai Keruh	19.910.000,00	
					Kecamatan Tungal Jaya	43.565.960,00	
					Sekretariat Daerah	22.371.907.706,00	
					Sekretariat DPRD	8.221.456.388,00	



BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan Organisasi Perangkat Daerah dituangkan secara deskriptif pada Tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1.

**Plafon Anggaran per Masing-masing Urusan dan Perangkat Daerah
RAPBD Tahun 2025**

**Plafon Anggaran Per Masing-masing Urusan dan Perangkat Daerah
Rancangan KUA PPAS Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun Anggaran 2025**

No.	Perangkat Daerah	Rancangan KUA-PPAS	Hasil Pembahasan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	683.169.724.091	668.321.874.091	(14.847.850.000)
2	Dinas Kesehatan	352.310.459.657	334.276.542.332	(18.033.917.325)
	2.01 RSUD Sungai Lilin	31.250.000.000	31.250.000.000	-
	2.02 RSUD Bayung Lencir	27.500.000.000	27.500.000.000	-
	2.03 Puskesmas Ngulak	2.288.845.000	2.288.845.000	-
	2.04 Puskesmas Babat Toman	2.662.818.000	2.662.818.000	-
	2.05 Puskesmas Ulak Paceh	2.661.842.000	2.661.842.000	-
	2.06 Puskesmas Tanah Abang	1.660.635.000	1.660.635.000	-
	2.07 Puskesmas Lubuk Bintialo	859.000.000	859.000.000	-
	2.08 Puskesmas Bukit Selabu	641.408.000	641.408.000	-
	2.09 Puskesmas Cinta Karya	1.200.914.000	1.200.914.000	-
	2.10 Puskesmas Suka Damai	1.078.177.000	1.078.177.000	-
	2.11 Puskesmas Sido Rahayu	1.032.545.000	1.032.545.000	-
	2.12 Puskesmas Tebing Bulang	2.422.058.000	2.422.058.000	-
	2.13 Puskesmas Jirak	1.404.263.000	1.404.263.000	-
	2.14 Puskesmas Balai Agung	3.734.530.000	3.734.530.000	-
	2.15 Puskesmas Lumpatan	2.849.318.000	2.849.318.000	-
	2.16 Puskesmas Lais	2.783.134.500	2.783.134.500	-
	2.17 Puskesmas Gardu Harapan	932.395.500	932.395.500	-
	2.18 Puskesmas Teluk Kijing	1.260.631.000	1.260.631.000	-
	2.19 Puskesmas Tanjung Kerang	1.709.166.800	1.709.166.800	-
	2.20 Puskesmas Sungai Lilin	2.947.935.700	2.947.935.700	-
	2.21 Puskesmas Sri Gunung	1.308.207.000	1.308.207.000	-
	2.22 Puskesmas Karya Maju	1.821.514.000	1.821.514.000	-
	2.23 Puskesmas Mekar jaya	934.886.000	934.886.000	-
	2.24 Puskesmas Bayung Lencir	4.689.370.000	4.689.370.000	-
	2.25 Puskesmas Suka Jaya	1.473.013.000	1.473.013.000	-
	2.26 Puskesmas Peninggalan	1.660.635.000	1.660.635.000	-
	2.27 Puskesmas Sumber Harum	1.190.623.000	1.190.623.000	-
	2.28 Puskesmas Berojaya Timur	1.013.775.000	1.013.775.000	-
	2.29 Puskesmas Bandar Agung	1.129.247.000	1.129.247.000	-
	2.30 Puskesmas Karang Mukti	1.780.339.000	1.780.339.000	-
	2.31 Puskesmas Air Balui	605.263.500	605.263.500	-
	2.101 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	149.999.999.929	149.999.999.929	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	380.012.231.730	389.116.319.679	9.104.087.949
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	195.972.939.276	228.409.255.813	32.436.316.537
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.069.761.264	14.866.072.375	(203.688.889)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	30.653.108.613	29.402.308.186	(1.250.800.427)
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.883.625.819	17.670.022.828	(1.213.602.991)
8	Dinas Sosial	73.397.068.408	73.044.030.887	(353.037.521)
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	17.387.378.681	14.705.863.681	(2.681.515.000)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.077.558.745	8.885.876.989	(191.681.756)
11	Dinas Ketahanan Pangan	11.533.147.949	11.297.553.505	(235.594.444)
12	Dinas Lingkungan Hidup	48.047.109.119	47.694.443.605	(352.665.514)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22.792.577.096	22.471.692.694	(320.884.402)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.245.192.209	20.010.951.733	(234.240.476)

No.	Perangkat Daerah	Rancangan KUA-PPAS	Hasil Pembahasan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
15	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	16.190.029.996	15.899.994.282	(290.035.714)
16	Dinas Perhubungan	17.913.055.750	18.878.907.179	965.851.429
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	27.932.900.112	27.541.448.619	(391.451.493)
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.728.636.953	11.850.517.905	121.880.952
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.043.425.795	18.600.812.462	(442.613.333)
20	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	94.705.372.923	101.941.941.622	7.236.568.699
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	11.445.162.449	11.156.812.449	(288.350.000)
22	Dinas Perikanan	15.753.042.341	16.494.925.674	741.883.333
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	46.934.134.992	46.549.807.214	(384.327.778)
24	Dinas Perkebunan	42.116.030.137	42.364.296.804	248.266.667
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	30.694.645.421	26.881.266.906	(3.813.378.515)
26	Sekretariat Daerah	122.387.070.714	120.811.591.060	(1.575.479.654)
27	Sekretariat DPRD	104.546.316.626	106.813.431.705	2.267.115.079
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.870.247.371	23.261.719.593	(608.527.778)
29	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	523.808.236.191	522.899.586.811	(908.649.380)
30	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	32.393.021.252	31.567.465.696	(825.555.556)
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	19.185.655.743	18.775.086.251	(410.569.492)
32	Inspektorat	26.466.377.003	25.621.100.590	(845.276.413)
33	Kecamatan Sekayu	11.450.185.633	9.724.469.839	(1.725.715.794)
	33.01 Kelurahan Serasan Jaya	849.999.937	849.999.937	-
	33.02 Kelurahan Soak Baru	849.999.948	849.999.948	-
	33.03 Kelurahan Balai Agung	850.000.000	850.000.000	-
	33.04 Kelurahan Kayuara	850.000.000	850.000.000	-
34	Kecamatan Lais	4.800.229.366	4.671.575.953	(128.653.413)
35	Kecamatan Babat Toman	7.005.429.070	5.111.810.737	(1.893.618.333)
	35.01 Kelurahan Babat	849.998.751	849.998.751	-
	35.02 Kelurahan Mangun Jaya	849.998.767	849.998.767	-
36	Kecamatan Keluang	6.992.481.456	4.541.453.123	(2.451.028.333)
	36.01 Kelurahan Keluang	849.999.875	849.999.875	-
37	Kecamatan Sanga Desa	6.746.589.886	5.231.826.315	(1.514.763.571)
	37.01 Kelurahan Ngulak I	848.720.148	848.720.148	-
	37.02 Kelurahan Ngulak	848.564.566	848.564.566	-
38	Kecamatan Plakat Tinggi	4.055.446.567	3.452.126.423	(603.320.144)
39	Kecamatan Batanghari Leko	4.838.096.621	3.838.838.954	(999.257.667)
40	Kecamatan Sungai Keruh	3.824.643.711	3.729.241.886	(95.401.825)
41	Kecamatan Sungai Lilin	5.147.360.634	4.992.630.396	(154.730.238)
	41.01 Kelurahan Sungai Lilin	850.000.000	850.000.000	-
	41.02 Kelurahan Sungai Lilin Jaya	850.000.000	850.000.000	-
42	Kecamatan Bayung Lencir	4.636.058.274	4.491.388.274	(144.670.000)
	42.01 Kelurahan Bayung Lencir	849.014.113	849.014.113	-
	42.02 Kelurahan Bayung Lencir Indah	849.918.355	849.918.355	-
43	Kecamatan Lalan	7.763.292.886	4.164.662.653	(3.598.630.233)
44	Kecamatan Tungal Jaya	5.983.936.133	4.684.002.562	(1.299.933.571)
45	Kecamatan Lawang Wetan	5.889.169.839	4.418.768.712	(1.470.401.127)
46	Kecamatan Babat Supat	3.644.159.642	3.548.719.688	(95.439.954)
47	Kecamatan Jirak Jaya	3.878.748.239	2.649.926.025	(1.228.822.214)
TOTAL BELANJA DAERAH		3.423.853.775.772	3.408.867.666.146	(14.986.109.626)



BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 terkait dengan proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah merupakan penganggaran untuk semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun 2025 maupun tahun sebelumnya.

Komponen penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2025 diharapkan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu yang merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD Induk dianggarkan berdasarkan estimasi, dan didefinisikan dalam perubahan APBD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Selain SiLPA, penerimaan biaya direncanakan dari Penerimaan Pinjaman Daerah.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan yang belum terealisasi, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024. Besaran SiLPA pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 69.983.013.972,-.

Komponen Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2025 sebesar Rp. 27.486.109.626,- digunakan untuk Penyertaan Modal (investasi daerah) sebesar Rp. 27.486.109.626,- terdiri dari

- a. Perumda Air Minum Tirta Randik sebesar Rp. 24.486.109.626,-



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

b. Bank Sumsel Babel sebesar Rp. 3.000.000.000,-

Proyeksi pembiayaan daerah pada RAPBD Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 5.1. berikut :

Tabel 5.1

Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan RAPBD TA. 2025

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.1	Sisa Lebih Anggaran (SiLPA)	69.983.013.972,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	69.983.013.972,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	27.486.109.626,00
	- Perumda Air Minum Tirta Randik	24.486.109.626,00
	- Bank Sumsel Babel	3.000.000.000,00
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	27.486.109.626,00
	Pembiayaan Netto	42.496.904.346,00



BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sekayu, 31 Juli 2024

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

H. SANDI FAHLEPI